

**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH  
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

# **PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**







## **Peta Pembinaan Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Jakarta: Bina Praja Press, 2022  
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo  
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press  
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN : 978-623-88614-2-2

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:  
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat  
pid@litbangkemendagri.com  
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## **TIM PENULIS**

**Pengarah:**

Menteri Dalam Negeri  
Sekretaris Jenderal

**Penanggungjawab:**

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri  
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri  
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Dalam Negeri

**Penulis:**

1. Diah Ayu Kusumaningrum, S.Si
2. Maria Herlina, M.Si
3. Isman, AP

## **SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kepala Badan Strategi  
Kebijakan Dalam Negeri  
Kemendagri

**Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd**

## **SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH**

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

**Drs. Aferi S. Fudail, M.Si**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnyanya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	2
C. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	3

## **BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA**

A. KABUPATEN BIMA	5
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	5
Aspek Satuan Inovasi Daerah	6
B. KABUPATEN DOMPU	12
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	13
Aspek Satuan Inovasi Daerah	14
C. KABUPATEN LOMBOK BARAT	20
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	21
Aspek Satuan Inovasi Daerah	22
D. KABUPATEN LOMBOK TENGAH	28
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	28
Aspek Satuan Inovasi Daerah	29
E. KABUPATEN LOMBOK TIMUR	35
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	36
Aspek Satuan Inovasi Daerah	37
F. KABUPATEN LOMBOK UTARA	42
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	43
Aspek Satuan Inovasi Daerah	44
G. KABUPATEN SUMBAWA	49
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	50
Aspek Satuan Inovasi Daerah	51
H. KABUPATEN SUMBAWA BARAT	57
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	58
Aspek Satuan Inovasi Daerah	59
I. KOTA BIMA	64
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	65
Aspek Satuan Inovasi Daerah	66
J. KOTA MATARAM	72
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	73
Aspek Satuan Inovasi Daerah	74

<b>BAB III PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>81</b>
---	-----------

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Bima
- Gambar 2 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bima
- Gambar 3 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Bima
- Gambar 4 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Bima
- Gambar 5 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Bima
- Gambar 6 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Bima
- Gambar 7 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Bima
- Gambar 8 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Bima
- Gambar 9 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Bima
- Gambar 10 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bima
- Gambar 11 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Dompu
- Gambar 12 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Dompu
- Gambar 13 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Dompu
- Gambar 14 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Dompu
- Gambar 15 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Dompu
- Gambar 16 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Dompu
- Gambar 17 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Dompu
- Gambar 18 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Dompu
- Gambar 19 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Dompu
- Gambar 20 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Dompu

Gambar 21 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Dompu

Gambar 22 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Lombok Barat

Gambar 23 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lombok Barat

Gambar 24 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Lombok Barat

Gambar 25 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Lombok Barat

Gambar 26 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Lombok Barat

Gambar 27 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Lombok Barat

Gambar 28 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Lombok Barat

Gambar 29 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Lombok Barat

Gambar 30 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Lombok Barat

Gambar 31 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Barat

Gambar 32 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Barat

Gambar 33 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Lombok Tengah

Gambar 34 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lombok Tengah

Gambar 35 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Lombok Tengah

Gambar 36 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Lombok Tengah

Gambar 37 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Lombok Tengah

Gambar 38 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Lombok Tengah

Gambar 39 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Lombok Tengah

Gambar 40 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Lombok Tengah

Gambar 41 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Lombok Tengah

Gambar 42 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Gambar 43 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Gambar 44 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Lombok Timur

Gambar 45 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lombok Timur

Gambar 46 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Lombok Timur

Gambar 47 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Lombok Timur

Gambar 48 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Lombok Timur

Gambar 49 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Lombok Timur

Gambar 50 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Lombok Timur

Gambar 51 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Lombok Timur

Gambar 52 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Lombok Timur

Gambar 53 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Timur

Gambar 54 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Timur

Gambar 55 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Lombok Utara

Gambar 56 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lombok Utara

Gambar 57 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Lombok Utara

Gambar 58 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Lombok Utara

Gambar 59 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Lombok Utara

Gambar 60 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Lombok Utara

Gambar 61 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Lombok Utara

Gambar 62 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Lombok Utara

Gambar 63 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Lombok Utara

Gambar 64 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Utara

Gambar 65 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Utara

Gambar 66 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sumbawa

Gambar 67 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumbawa

Gambar 68 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sumbawa

Gambar 69 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sumbawa

Gambar 70 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sumbawa

Gambar 71 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sumbawa

Gambar 72 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sumbawa

Gambar 73 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sumbawa

Gambar 74 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sumbawa

Gambar 75 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa

Gambar 76 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa

Gambar 77 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sumbawa Barat

Gambar 78 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumbawa Barat

Gambar 79 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sumbawa Barat

Gambar 80 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sumbawa Barat

Gambar 81 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sumbawa Barat

Gambar 82 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sumbawa Barat

Gambar 83 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sumbawa Barat

Gambar 84 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sumbawa Barat

Gambar 85 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sumbawa Barat

Gambar 86 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Gambar 87 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Gambar 88 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Bima

Gambar 89 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Bima

Gambar 90 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Bima

Gambar 91 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Bima

Gambar 92 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Bima

Gambar 93 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Bima

Gambar 94 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Bima

Gambar 95 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Bima

Gambar 96 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Bima

Gambar 97 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Bima

Gambar 98 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kota Bima

Gambar 99 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Mataram

Gambar 100 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Mataram

Gambar 101 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Mataram

Gambar 102 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Mataram

Gambar 103 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Mataram

Gambar 104 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Mataram

Gambar 105 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Mataram

Gambar 106 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Mataram

Gambar 107 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Mataram

Gambar 108 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Mataram

Gambar 109 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kota Mataram

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah
- Tabel 2 Daftar Inovasi Kabupaten Bima beserta Skor Kematangannya
- Tabel 3 Daftar Inovasi Kabupaten Dompu beserta Skor Kematangannya
- Tabel 4 Daftar Inovasi Kabupaten Lombok Barat beserta Skor Kematangannya
- Tabel 5 Daftar Inovasi Kabupaten Lombok Tengah beserta Skor Kematangannya
- Tabel 6 Daftar Inovasi Kabupaten Lombok Timur beserta Skor Kematangannya
- Tabel 7 Daftar Inovasi Kabupaten Lombok Utara beserta Skor Kematangannya
- Tabel 8 Daftar Inovasi Kabupaten Sumbawa beserta Skor Kematangannya
- Tabel 9 Daftar Inovasi Kabupaten Sumbawa Barat beserta Skor Kematangannya
- Tabel 10 Daftar Inovasi Kota Bima beserta Skor Kematangannya
- Tabel 11 Daftar Inovasi Kota Mataram beserta Skor Kematangannya
- Tabel 12 Variabel dan Indikator Pada satuan Inovasi Daerah IID Tahun 2021
- Tabel 13 Pembinaan Inovasi Daerah di Kabupaten Bima Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021
- Tabel 14 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Dompu Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021
- Tabel 15 Pembinaan Inovasi Daerah di Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021
- Tabel 16 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021
- Tabel 17 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021
- Tabel 18 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Lombok Utara Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021
- Tabel 19 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021
- Tabel 20 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021
- Tabel 21 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kota Bima Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021
- Tabel 22 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021



An aerial photograph of a lake surrounded by dense forest, with a red color overlay. The text 'BAB I' is prominently displayed in the center-right of the image.

# ***BAB I***

---

## ***PENDAHULUAN***



## A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman [indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id](https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id). Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelembagaan inovasi dan kemampuan mensinergikan antara kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021*, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

## **B. MANFAAT**

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

## **C. TUJUAN**

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah

- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

#### D. RUANG LINGKUP

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bima, dan Kota Mataram.

Informasi capaian kinerja inovasi di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing.

Tabel 1 Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
SPD	Institusi	Visi Misi
		Tingkat Lembaga Kelitbangan
		APBD Tepat Waktu
		Kualitas Peningkatan Perizinan
		Jumlah Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Jumlah Peningkatan Investasi
		Jumlah Peningkatan PAD
		Opini BPK
		Nilai Capaian Lakip
		Penurunan Angka Kemiskinan
	Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian	Jumlah Inovasi Daerah
		Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi
		Roadmap SiDA
	SDM	Nilai IPM
		Penghargaan Bagi Inovator

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
SID	Hasil Kreatif	Kemanfaatan Inovasi
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
		Kualitas Inovasi Daerah
	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah
		Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah
		Dukungan Anggaran
		Penggunaan IT
		Bimtek Inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
	Kecanggihan Produk	Replikasi
		Online Sistem
		Kecepatan Inovasi
	Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman Teknis
		Kemudahan Informasi Layanan
		Penyelesaian Layanan Pengaduan
		Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
	Output Pengetahuan dan Teknologi	Jejaring Inovasi
		Pelaksana Inovasi Daerah
		Keterlibatan aktor inovasi
		Sosialisasi Inovasi Daerah



# ***BAB II***

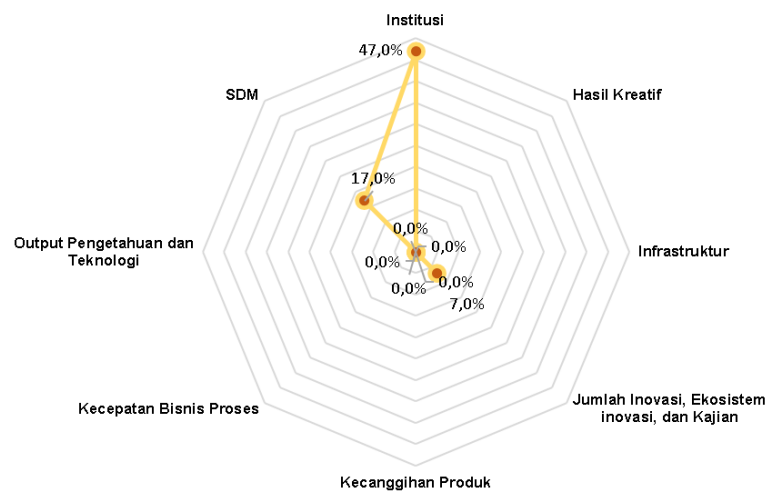
---

***INOVASI DAERAH KLASTER  
KABUPATEN DAN KLASTER KOTA***





## A. KABUPATEN BIMA



Gambar 1 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Bima

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Bima memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 47.00%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Sumber Daya Manusia masih cukup rendah, yaitu 17.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



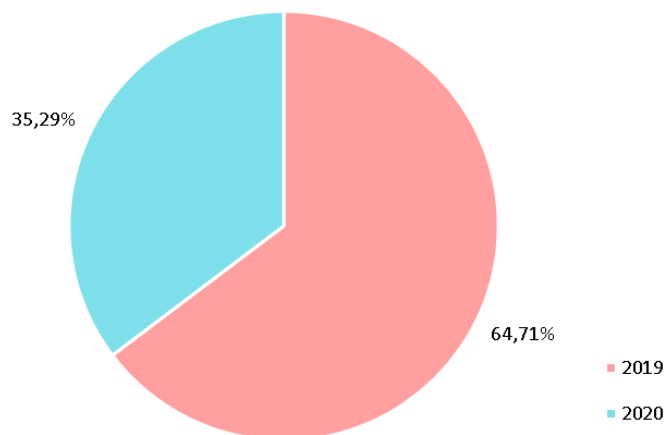
Gambar 2 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bima

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah

Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bima belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan sebesar 1.14% dimana nilai tersebut jauh lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%. Namun, ternyata data juga menunjukkan adanya kenaikan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 8.29%, dimana nilai tersebut hampir mendekati standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 8%. Selain itu, indikator Jumlah Peningkatan Investasi juga mengalami kenaikan sebesar 3.80%, dimana nilai tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0.45%. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Bima mengalami kenaikan sebesar 7.43%, dimana nilai tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1.85%. Pemerintah Kabupaten Bima ternyata mengalami penurunan yang sangat signifikan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 383%, namun nilai pada indikator ini tidak dapat diperhitungkan karena data yang diinput kemungkinan tidak sesuai dengan yang diminta oleh sistem aplikasi indeks inovasi daerah. Sedangkan, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penurunan Angka Kemiskinan sebesar 0% yang artinya bahwa tidak ada data yang diinput oleh Kabupaten Bima terkait dengan indikator-indikator tersebut.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

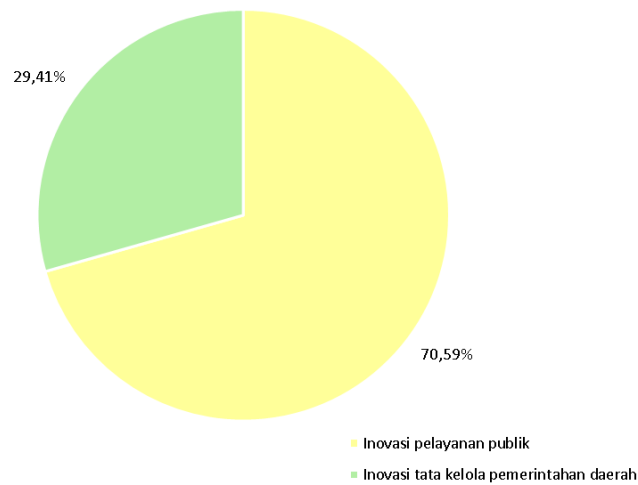
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 3 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Bima

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bima telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 11 (64.71%) inovasi dari 17 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 6 (35.29%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

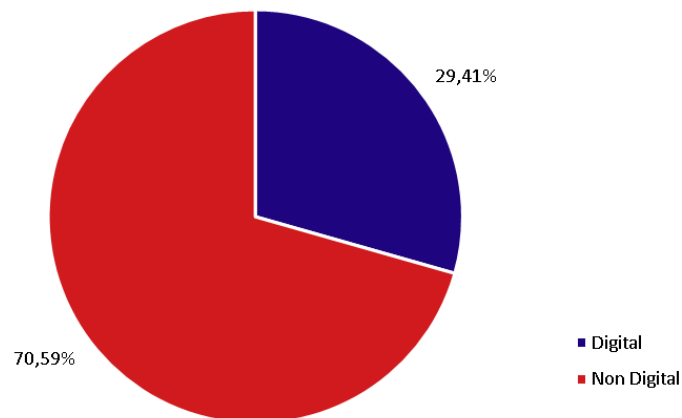
## b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 4 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Bima

Berdasarkan bentuk inovasi, data menunjukkan bahwa sebanyak 12 (70,59%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Bima merupakan inovasi dalam bentuk Pelayanan Publik sedangkan sisanya yaitu sebanyak 5 (29,41%) inovasi daerah merupakan inovasi dalam bentuk Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

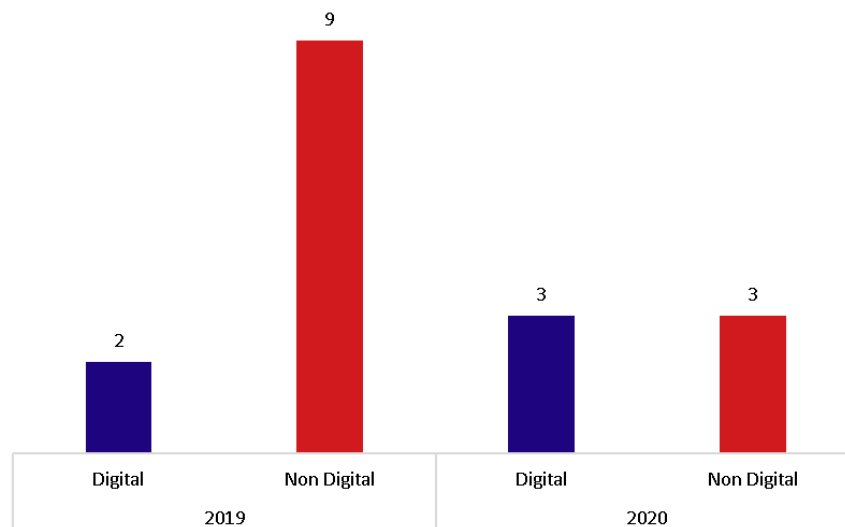
## c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 5 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Bima

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 12 (70,59%) dari 17 inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Bima merupakan inovasi non digital, sedangkan sisanya sebanyak 5 (29,41%) inovasi merupakan inovasi digital.

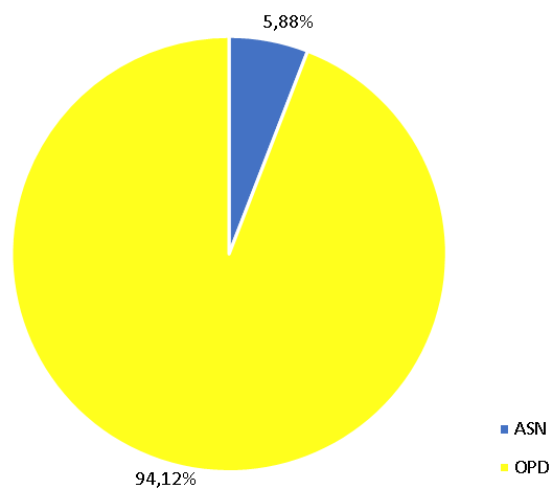
#### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 6 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Bima

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, terutama untuk jenis inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 3 inovasi. Sedangkan inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 9 inovasi namun pada tahun 2020 menjadi 3 inovasi.

#### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

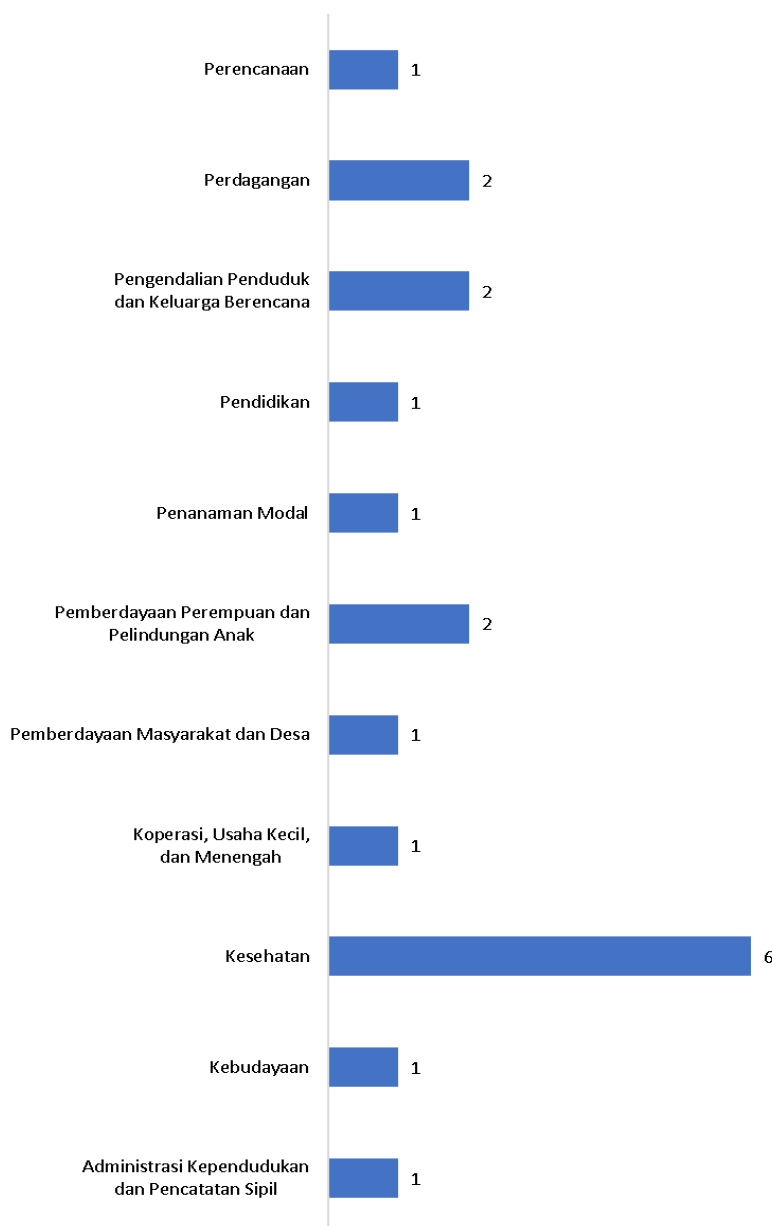


Gambar 7 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Bima

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Bima pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ASN dengan rincian 16 (94.12%) inovasi diinisiasi oleh Perangkat

Daerah sedangkan sisanya 1 (1.74%) inovasi diinisiasi oleh ASN. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

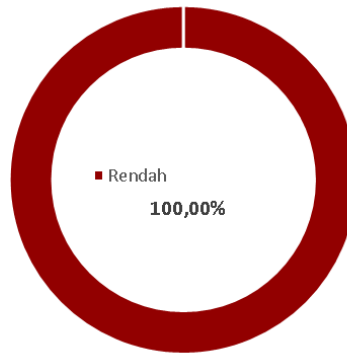


Gambar 8 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Bima

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Bima berdasarkan urusan pemerintahan sudah cukup merata karena mencakup 11 dari 32 urusan pemerintahan yang ada. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan kesehatan dengan 6 inovasi dari 17 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 2 (dua) dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 1 inovasi dan urusan kesehatan dengan 6 inovasi. Sedangkan sisanya yaitu urusan perencanaan, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi dan UMKM, kebudayaan, serta administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil dengan 1 inovasi. Urusan perdagangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan 2 inovasi.

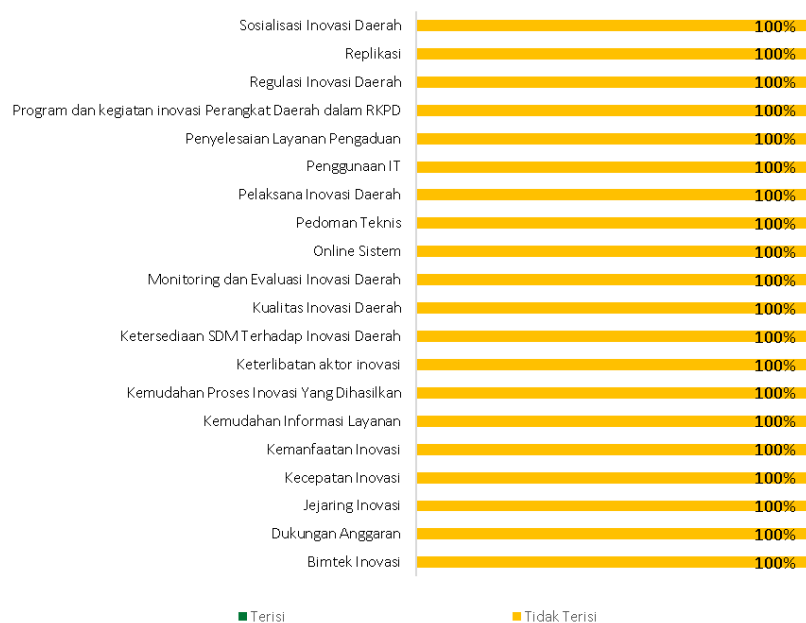
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



Gambar 9 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Bima

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bima sejumlah 17 inovasi memiliki skor kematangan yang rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

## h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 10 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bima

Dari 17 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bima, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 100% yang artinya bahwa tidak ada satupun inovasi yang telah terisi data pendukung.

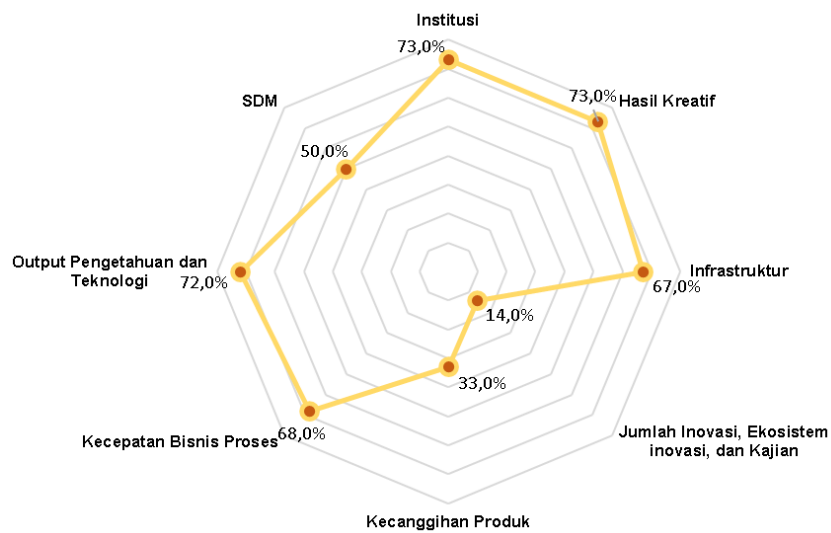
## i. Daftar Inovasi Kabupaten Bima beserta Skor Kematangannya

Tabel 2 Daftar Inovasi Kabupaten Bima beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Pelayanan Ala Korona (PELAKOR) Menyongsong Tatanan Hidup Baru	0
Museum diHATI Kita (Hidup Aman Tanpa covid19)	0
IRAMA NORMAL BARU (Inovasi Rumah Makan Menyongsong Normal Baru)	0
SIGESIT !!!!! LAWAN CORONA (INTEGRASI GERAKAN DAN SISTEM INFORMASI PASAR TRADISIONAL)	0
KARTU BERGAMBAR, SOLUSI SALAH RUANG (KABARI SARUNG)	0
Menembak Simiskin Dalam Satu Bidikan Melalui MADABIMA	0
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus (Perempuan, Anak, Lansia, Warga Kebutuhan Khusus)	0
PADI BERSALAH (PELAYANAN TERPADU IBU HAMIL BERMASALAH)	0
“PAPA UNTUK MAMA” (PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK MASYARAKAT MARGINAL)	0
Optimalisasi Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah Melalui SELINGAN BAND GIGI (Sehat Lingkungan, Badan Dan Gigi)	0
INTEGRASI GERAKAN DAN SISTIM INFORMASI PASAR TRADISIONAL – SI GESIT	0
DANA INSENTIF DESA (DINDA) KABUPATEN BIMA	0

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
CEGAH REMAJA DARI ANEMIA (CERIA) DI PUSKESMAS LAMBITU KABUPATEN BIMA	0
SIM CANTIK (Surat Izin Menikah Calon Pengantin dari Kesehatan)	0
INOVASI “GERAKAN 16660 JAMBAN”	0
“GEMAR LITERASI FB” (GERAKAN MASYARAKAT SADAR LITERASI BERKARAKTER YANG INKLUSIF for BIMA)	0
Sentuh Perempuan dengan SIMAWAR	0

## B. KABUPATEN DOMPU

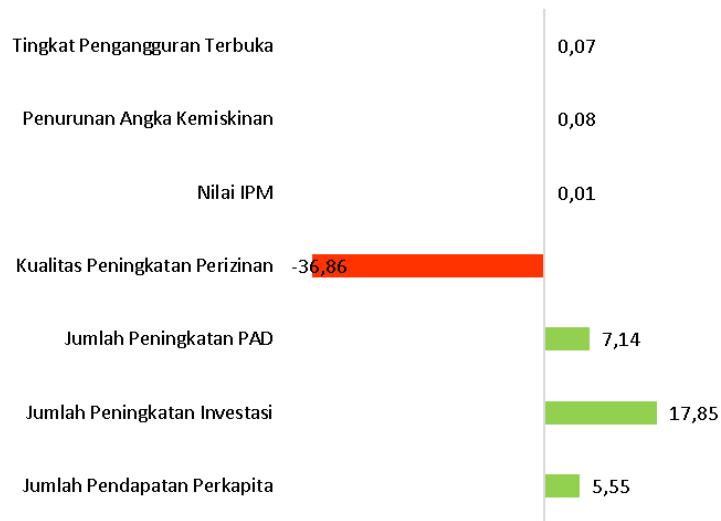


Gambar 11 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Dompu

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Dompu memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi dan Hasil Kreatif, yaitu sebesar 73.00%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi dan Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 14.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.



## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



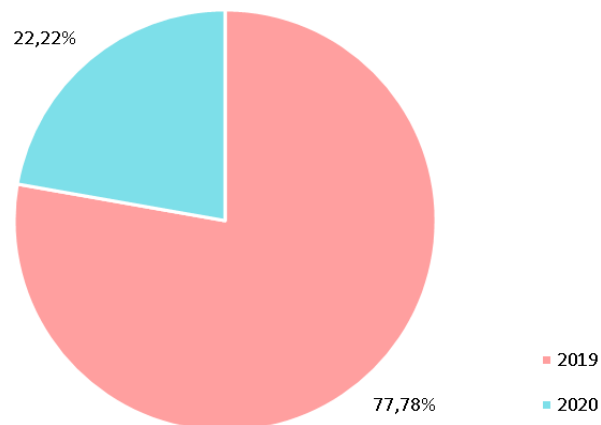
Gambar 12 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Dompu

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Dompu belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya kenaikan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.07%, dimana nilai tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.08%, angka tersebut ternyata lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 0.02%. Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami kenaikan sebesar 0.01% dimana nilai tersebut hampir mendekati nilai standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 36.86%, dimana nilai tersebut jauh lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%.

Pemerintah Kabupaten Dompu mengalami kenaikan pada Jumlah Peningkatan PAD sebesar 7.14% dimana angka tersebut hampir mendekati standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan kenaikan sebesar 8%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang juga mengalami kenaikan sebesar 17.85% dimana angka tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 0.45%. Terakhir, untuk indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Dompu menunjukkan kenaikan sebesar 5.55%, dimana nilai tersebut ternyata lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami penurunan sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

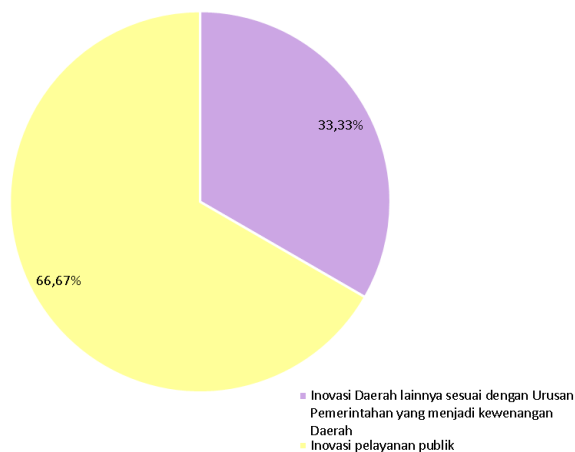
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 13 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Dompu

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Dompu telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 7 (77.78%) inovasi dari 9 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 2 (22.22%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

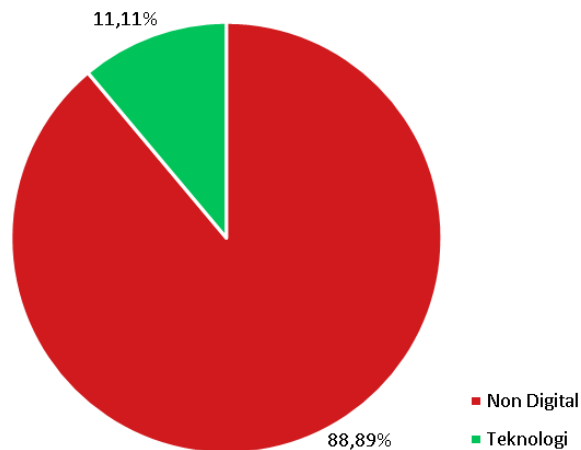
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 14 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Dompu

Berdasarkan bentuk inovasi, data menunjukkan bahwa sebanyak 6 (66.67%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Dompu merupakan inovasi dalam bentuk Pelayanan Publik sedangkan sisanya yaitu sebanyak 3 (33.33%) inovasi daerah merupakan inovasi dalam bentuk lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

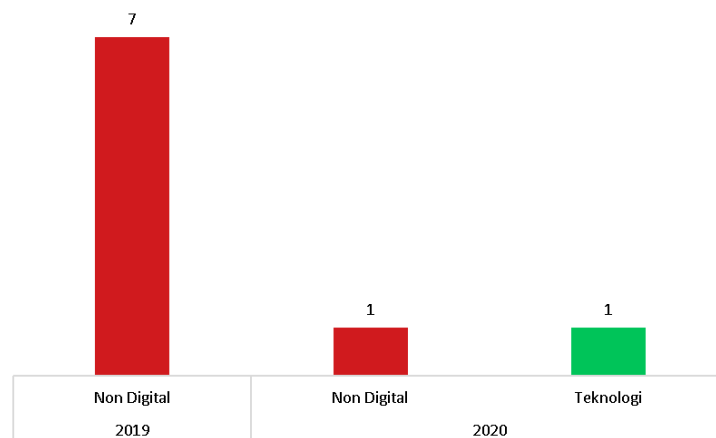
### c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 15 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Dompu

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 8 (88.89%) dari 9 inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Dompu merupakan inovasi non digital, sedangkan sisanya sebanyak 1 (11.11%) inovasi merupakan inovasi teknologi.

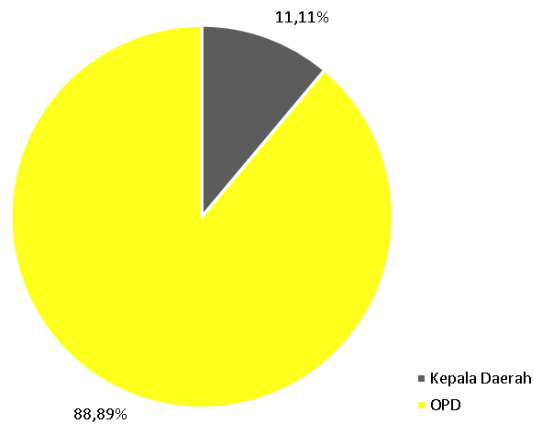
### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 16 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Dompu

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, terutama untuk jenis inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi non digital menurun di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 7 inovasi kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 1 inovasi. Selain itu, pada tahun 2020 terdapat jenis inovasi baru yaitu inovasi teknologi sejumlah 1 inovasi yang telah diterapkan pada tahun tersebut.

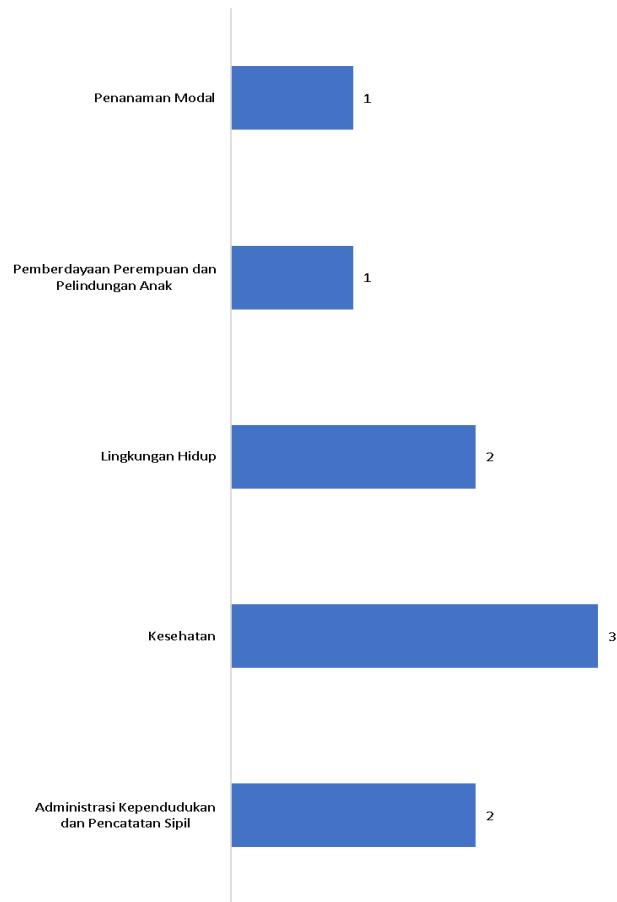
#### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 17 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Dompu

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Dompu pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Kepala Daerah dengan rincian 8 (88.89%) inovasi diinisiasi oleh Perangkat Daerah sedangkan sisanya 1 (11.11%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

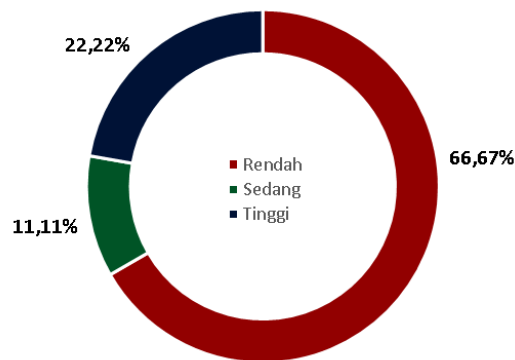
## f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 18 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Dompu

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Dompu berdasarkan urusan pemerintahan belum cukup merata karena hanya mencakup 5 dari 32 urusan pemerintahan yang ada yaitu urusan penanaman modal, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, kesehatan serta dukcapil. Sebagian besar urusan inovasi adalah inovasi pada urusan kesehatan sejumlah 3 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, hanya terdapat 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 3 inovasi, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum dilaporkan.

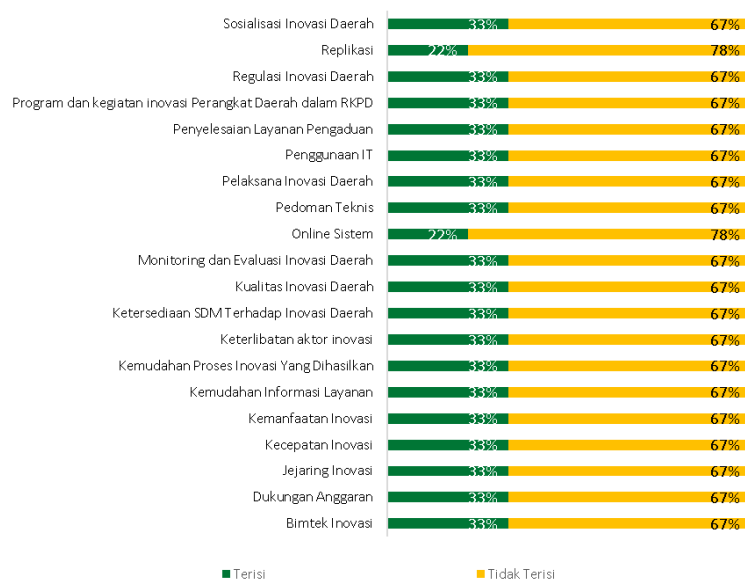
### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 19 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Dompu

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Dompu memiliki skor kematangan yang rendah yaitu sejumlah 6 inovasi kemudian inovasi dengan skor kematangan sedang sejumlah 1 inovasi dan inovasi dengan skor kematangan tinggi sejumlah 2 inovasi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



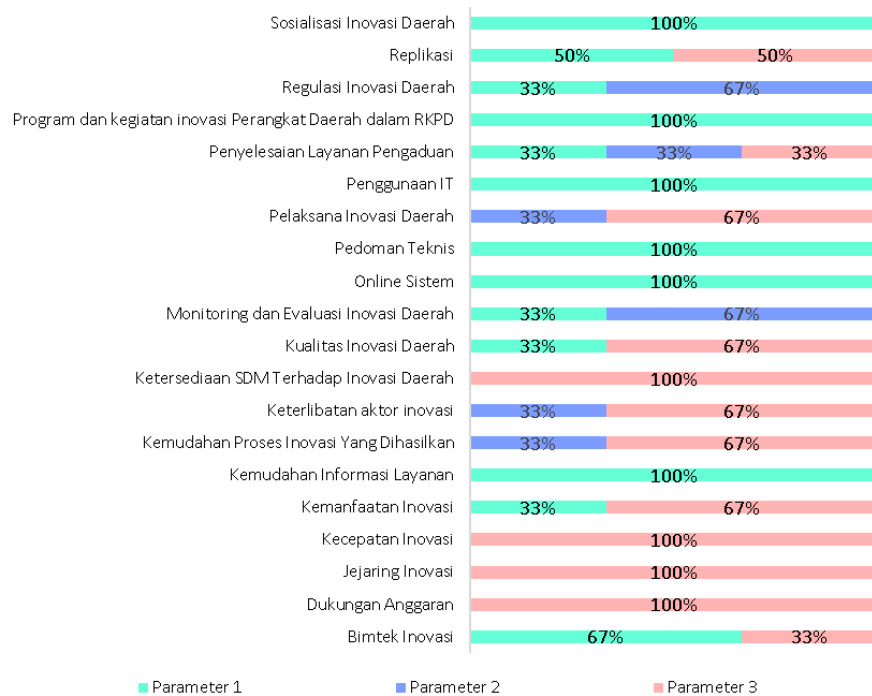
Gambar 20 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Dompu

Dari 9 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Dompu, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 67.78% sedangkan 32.22% lainnya telah terisi data pendukung. Sebagian besar indikator ternyata

memiliki tingkat keterisian data pendukung sebesar 33% kecuali indikator Replikasi dan Online sistem. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Dompu telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut.

Selanjutnya hanya tersisa 2 indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu indikator replikasi dan online sistem sebesar 22% yang artinya hanya 2 dari 9 inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

### i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 21 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Dompu

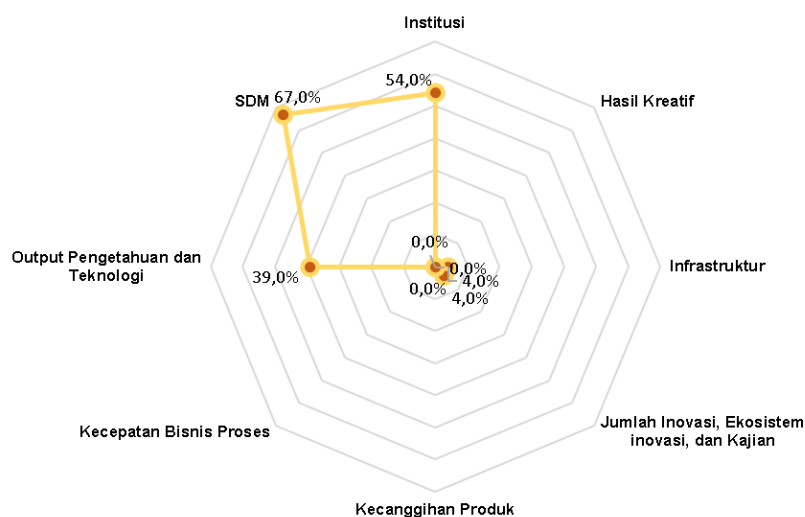
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Kecepatan Inovasi, Jejaring Inovasi, dan Dukungan Anggaran masing-masing sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah dan Regulasi Inovasi Daerah sebesar 67% artinya sebagian besar inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPd, Penggunaan IT, Pedoman Teknis, Online Sistem, dan Kemudahan Informasi Layanan sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

## j. Daftar Inovasi Kabupaten Dompu beserta Skor Kematangannya

Tabel 3 Daftar Inovasi Kabupaten Dompu beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
asdad	0
TAMARA (Taman Ramah Anak)	0
Bank Sampah	0
JEBOL LAGI (Jemput Bola Untuk Mewujudkan GISA)	0
SABATIK (Satu Bahan Dapat 3 Dokumen Kependudukan)	0
PASSOLEH (Pasti Selesai Setengah Hari)	0
GARDU TANGKAS PERAK (Gerakan Terpadu Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak)	72
Posyandu Keluarga Integrasi Dengan Bank Sampah	115
XOBAT ANTIK	104

## C. KABUPATEN LOMBOK BARAT

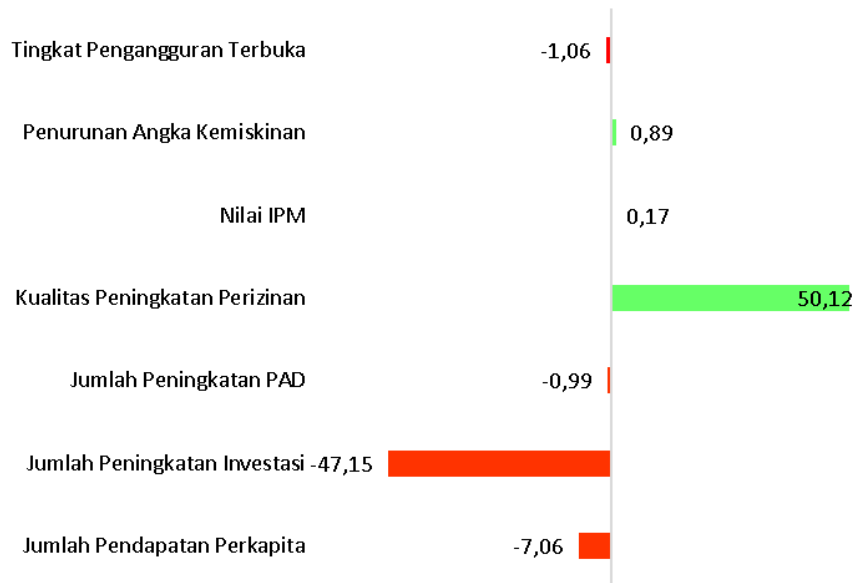


Gambar 22 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Lombok Barat memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu sebesar 67.00%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Infrastruktur serta Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 4.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.



## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



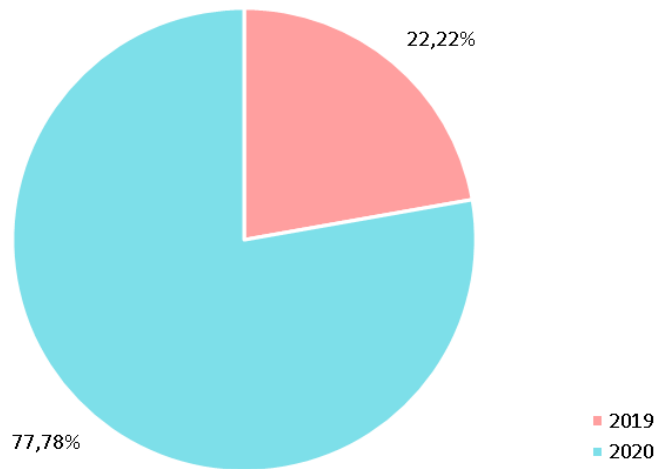
Gambar 23 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lombok Barat

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lombok Barat belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1.06%, dimana nilai penurunan tersebut sedikit lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.89%, angka tersebut ternyata lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 0.02%. Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami kenaikan sebesar 0.17% dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan ternyata mengalami kenaikan sebesar 50.12%, dimana nilai tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 0.99% dimana nilai tersebut jauh lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan kenaikan sebesar 8%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang mengalami penurunan sebesar 47.15%, dimana nilai tersebut jauh lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0.45%. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Lombok Barat yang menunjukkan penurunan sebesar 7.06%, dimana nilai tersebut masih jauh lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

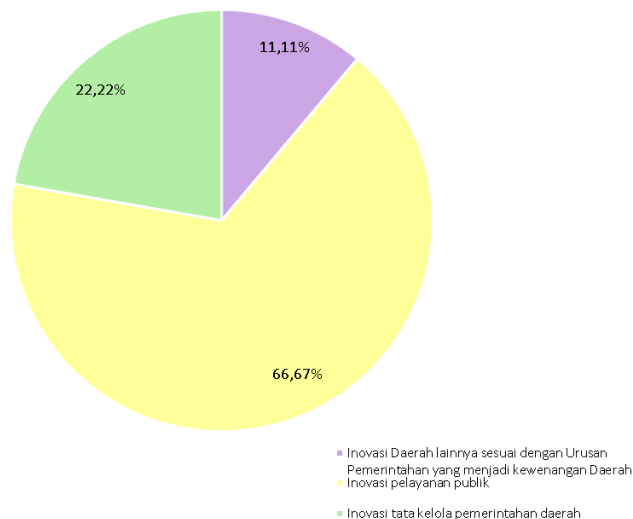
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 24 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Lombok Barat

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Barat telah diterapkan pada tahun 2020. Terdapat 7 (77.78%) inovasi dari 9 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2020 dan 2 (22.22%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

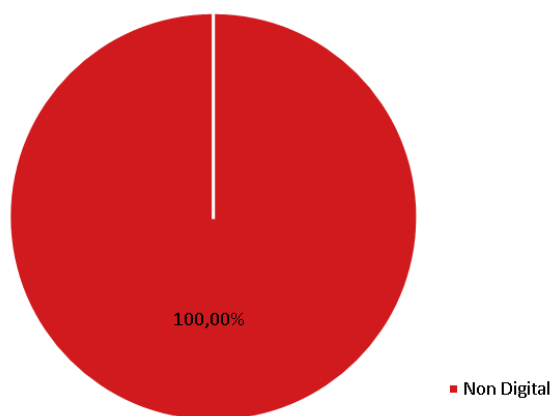


Gambar 25 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Barat, yaitu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi bentuk lainnya. Sebagian besar inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 6 (66.67%) inovasi, kemudian 2 (22.22%) inovasi adalah inovasi tata kelola pemerintahan

daerah dan 1 (11.11%) inovasi adalah inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

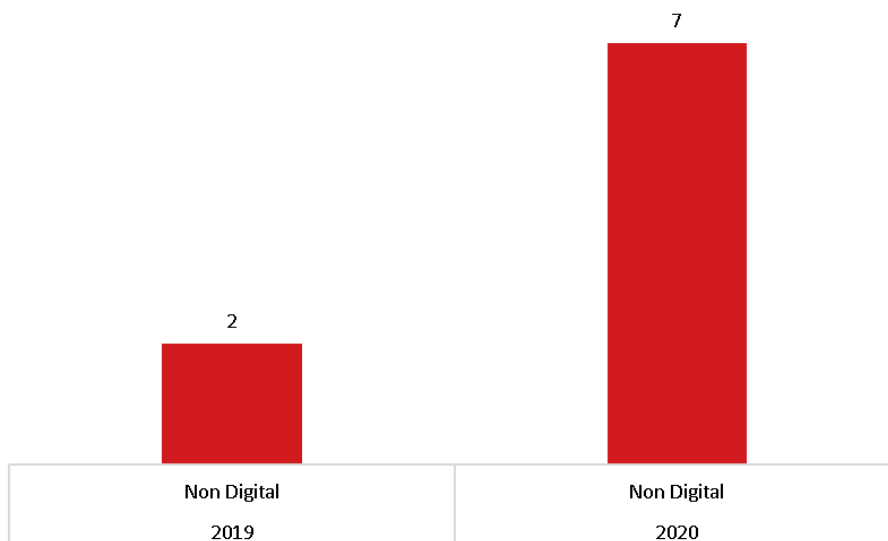
### c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 26 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Lombok Barat

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 9 (100%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Barat merupakan inovasi non digital, sedangkan untuk jenis inovasi digital dan teknologi belum dilaporkan.

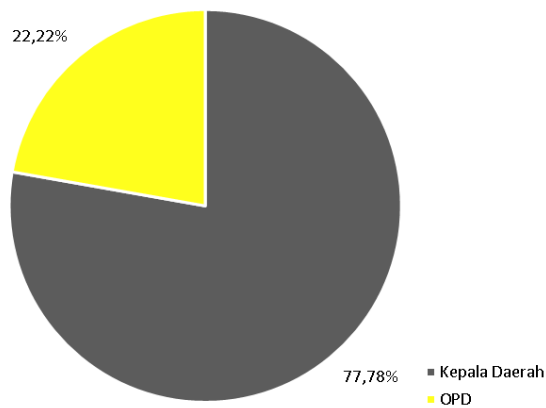
### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 27 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Lombok Barat

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya untuk inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi non digital meningkat di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan hanya sejumlah 2 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 7 inovasi. Sedangkan inovasi digital dan teknologi belum dilaporkan baik pada tahun 2019 maupun tahun 2020.

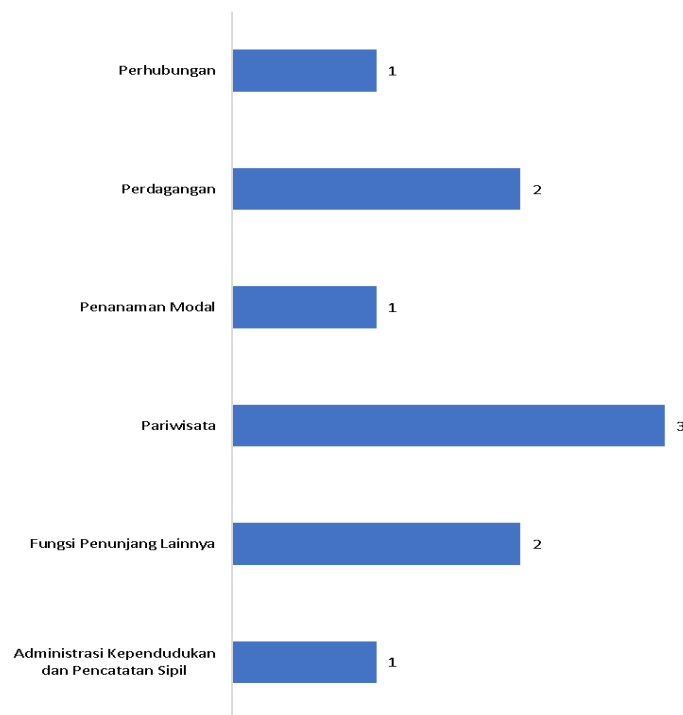
### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 28 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Lombok Barat

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Kepala Daerah dengan rincian 7 (77.78%) inovasi diinisiasi oleh Perangkat Daerah sedangkan sisanya 2 (22.22%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

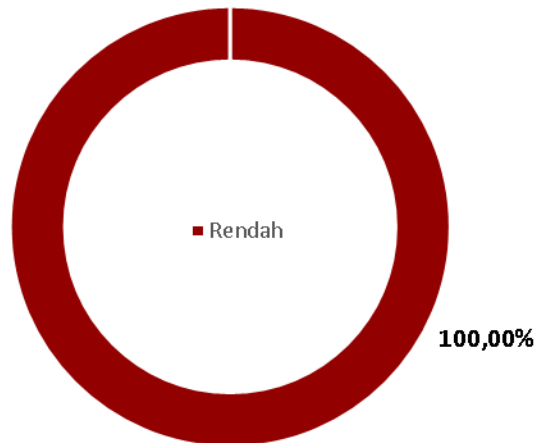


Gambar 29 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Lombok Barat

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Lombok Barat berdasarkan urusan pemerintahan belum cukup merata karena hanya mencakup 6 dari 32 urusan pemerintahan yang ada

yaitu urusan perhubungan, perdagangan, penanaman modal, pariwisata, fungsi penunjang lainnya dan dukcapil. Sebagian besar urusan inovasi adalah inovasi pada urusan pariwisata sejumlah 3 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, dapat dilihat bahwa inovasi pada 6 urusan wajib pelayanan dasar masih belum terlupakan.

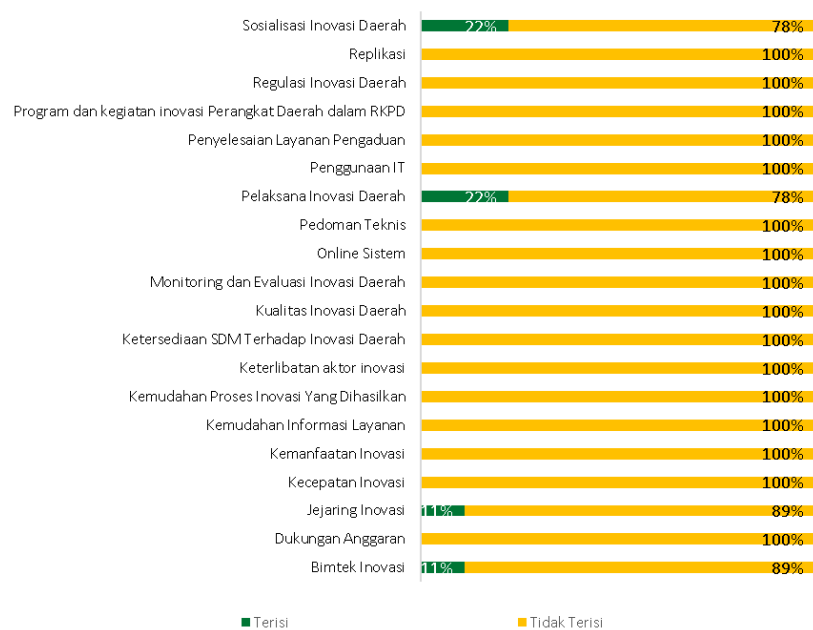
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



Gambar 30 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Lombok Barat

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Barat sejumlah 9 inovasi memiliki skor kematangan yang rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

## h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

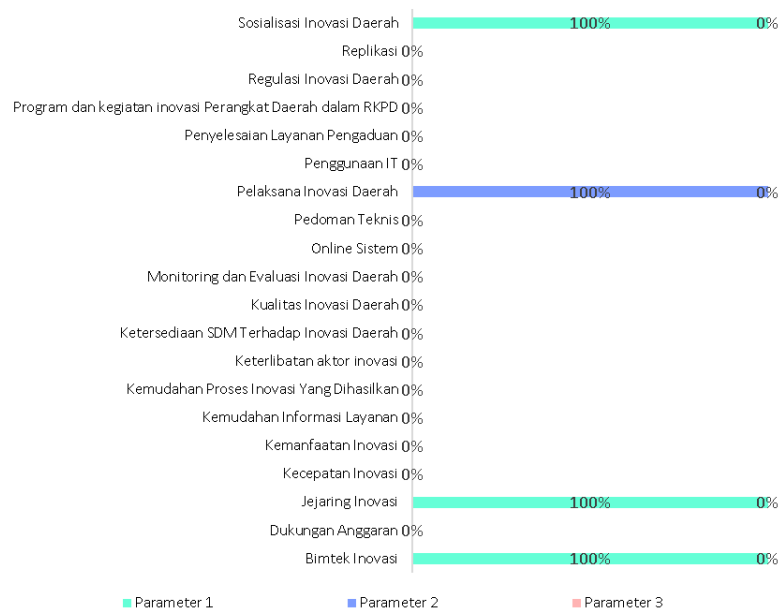


Gambar 31 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Barat

Dari 9 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Barat, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 96.67% sedangkan 3.33% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator satuan inovasi daerah yang memiliki tingkat keterisian data pendukung terbanyak adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah dan Pelaksana Inovasi Daerah yaitu sebesar 22%. Hal tersebut berarti bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Barat telah terisi data pendukung pada kedua indikator tersebut.

Namun ternyata masih banyak indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu indikator Replikasi, Regulasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penggunaan IT, Pedoman Teknis, Online Sistem, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, Kecepatan Inovasi, dan Dukungan Anggaran sebesar 0% yang artinya 9 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Barat tidak terisi data pendukung dari indikator-indikator tersebut.

## i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 32 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Barat

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa tidak terdapat indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga). Artinya bahwa tidak ada inovasi dengan data pendukung yang masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah yaitu sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Jejaring Inovasi dan Bimtek Inovasi yaitu sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

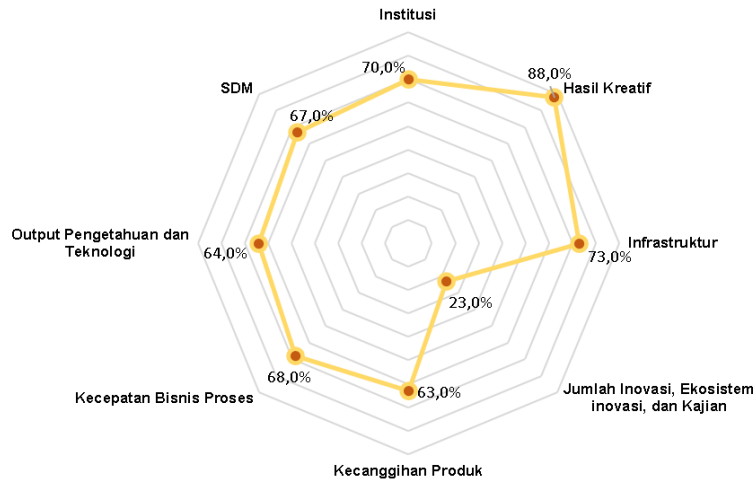
## j. Daftar Inovasi Kabupaten Lombok Barat beserta Skor Kematangannya

Tabel 4 Daftar Inovasi Kabupaten Lombok Barat beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
NYAMAN BERBELANJA DI PASAR TRADISIONAL ERA NEW NORMAL	0
NYAMAN BERBELANJA DI RETAIL MODERN ERA NEW NORMAL	0
PENERAPAN PROTOKOL COVID-19 DI PELABUHAN LEMBAR ERA NEW NORMAL	0
MENYONGSONG PELAYANAN PERIJINAN DAN KEPENDUDUKAN DI ERA NEW NORMAL	0
MENEW NORMALKAN RESTAURANT DAN WARUNG MAKAN	0
PERHOTELAN LOMBOK BARAT SIAP NEW NORMAL	0
PARIWISATA LOMBOK BARAT SIAP NEW NORMAL PASCA GEMPA DAN COVID-19	0

SEJELO NYAMBANG DESA (SENADA) KECAMATAN LINGSAR	5
NGAYO DESA KECAMATAN NARMADA	6

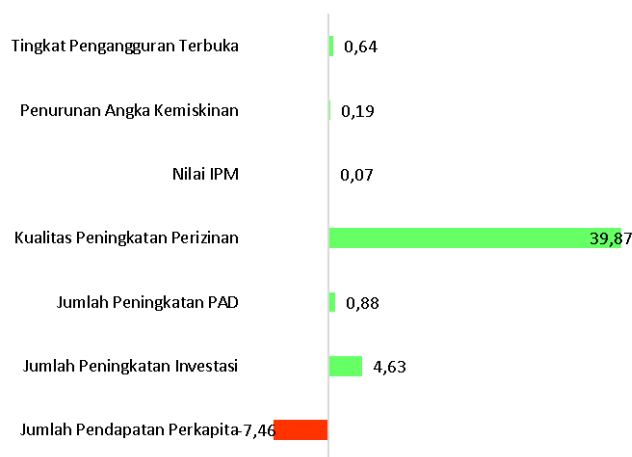
#### D. KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Gambar 33 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Lombok Tengah memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu sebesar 88.00%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 23.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

#### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 34 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lombok Tengah

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah

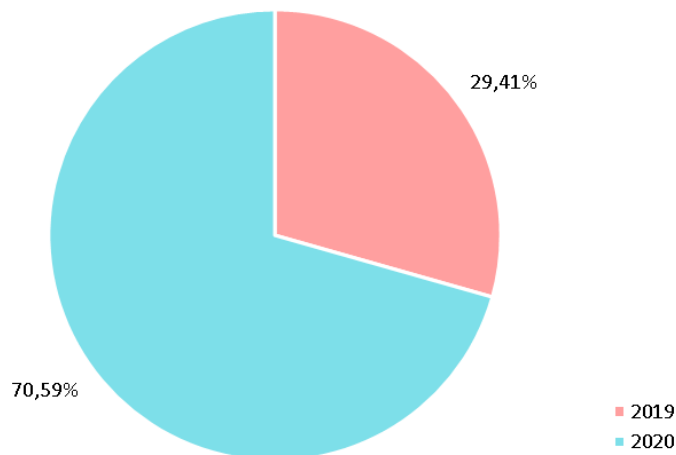


Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lombok Tengah belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya kenaikan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.64%, dimana nilai tersebut lebih tinggi dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.19%, angka tersebut ternyata lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik 0.02%. Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami kenaikan sebesar 0.07% dimana nilai tersebut sedikit lebih besar dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan ternyata mengalami kenaikan sebesar 39.87%, nilai tersebut jauh lebih besar dari dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengalami kenaikan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 0.88% dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan kenaikan sebesar 8%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang juga mengalami kenaikan sebesar 4.63% dimana nilai tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 0.45%. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Lombok Tengah yang menunjukkan penurunan sebesar 7.46%, dimana nilai tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya hanya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

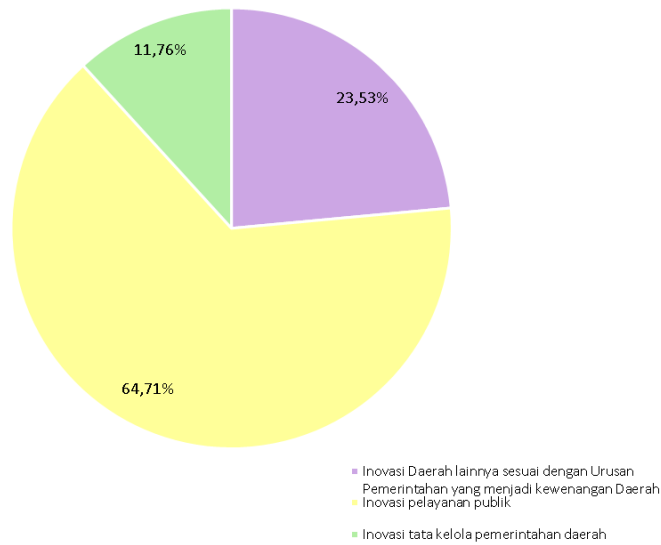
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 35 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Lombok Tengah

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Tengah telah diterapkan pada tahun 2020. Terdapat 12 (70.59%) inovasi dari 17 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2020 dan 5 (29.41%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

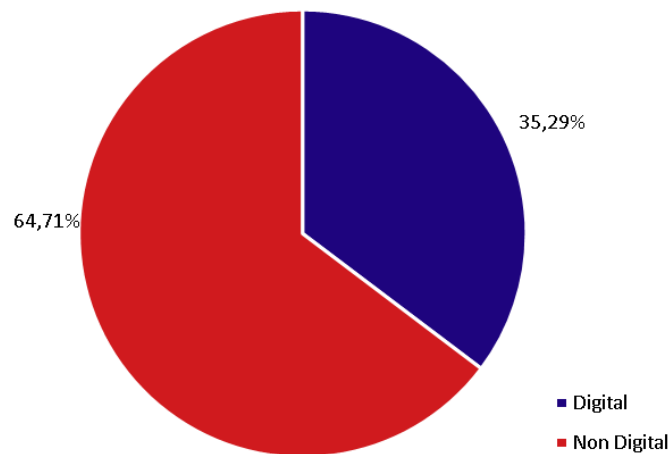
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 36 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Tengah, yaitu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi bentuk lainnya. Sebagian besar inovasi adalah inovasi pelayanan publik yaitu sejumlah 11 (64.71%) inovasi, kemudian 4 (23.53%) inovasi adalah inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta 2 (11.76%) inovasi adalah inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

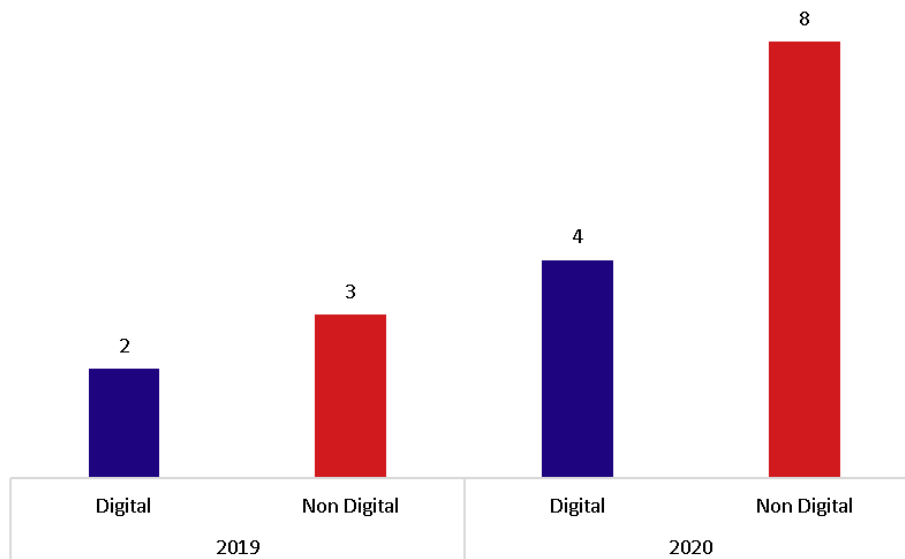
### c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 37 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Lombok Tengah

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 11 (64.71%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Tengah merupakan inovasi non digital, kemudian untuk jenis inovasi digital sejumlah 6 (35.29%) inovasi sedangkan untuk inovasi teknologi belum terlaporkan.

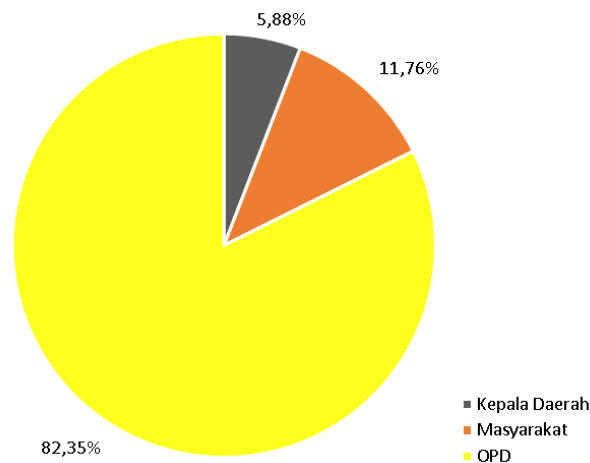
#### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 38 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Lombok Tengah

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya untuk inovasi digital dan non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi non digital meningkat di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan hanya sejumlah 3 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 8 inovasi. Demikian pula dengan inovasi digital yang mengalami peningkatan pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan hanya sejumlah 2 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 4 inovasi sedangkan untuk inovasi teknologi belum terlaporkan baik pada tahun 2019 maupun tahun 2020.

#### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

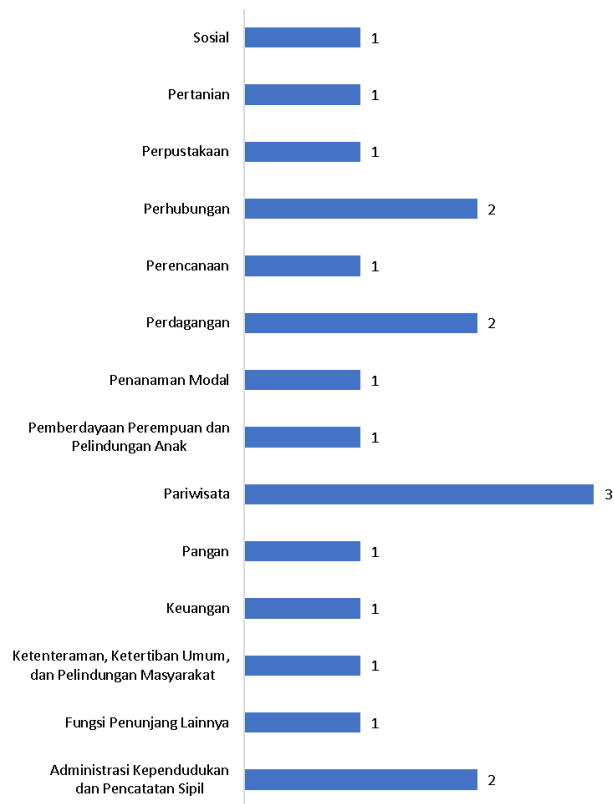


Gambar 39 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Lombok Tengah

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, Kepala Daerah, dan Masyarakat dengan rincian 14 (82.35%) inovasi diinisiasi oleh Perangkat Daerah, 2 (11.76%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat dan sisanya 1

(5.88%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN dan DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

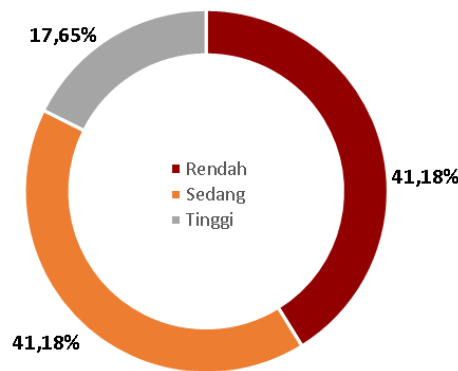
#### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 40 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Lombok Tengah

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan urusan pemerintahan sudah cukup merata karena mencakup 14 dari 32 urusan pemerintahan yang ada. Sebagian besar urusan inovasi adalah inovasi pada urusan pariwisata sejumlah 3 inovasi kemudian urusan perhubungan, perdagangan, dan dukcapil sejumlah 2 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 2 (dua) dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial dengan 1 inovasi serta urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan 6 inovasi.

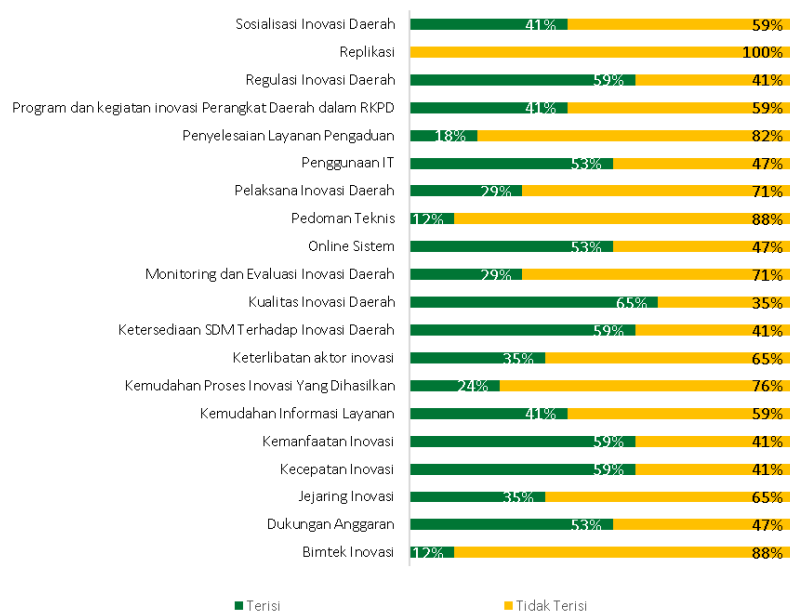
### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 41 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Lombok Tengah

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Tengah sejumlah 7 (41.18%) inovasi memiliki skor kematangan yang rendah, kemudian 7 (41.18%) inovasi memiliki skor kematangan sedang serta 3 (17.65%) inovasi memiliki skor kematangan yang tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



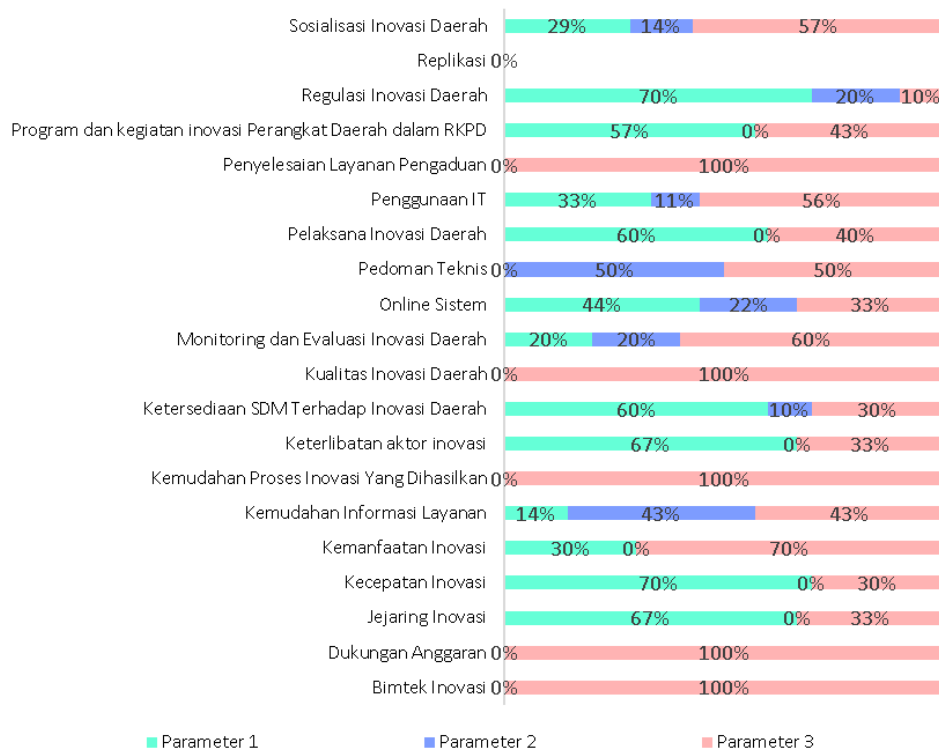
Gambar 42 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Dari 17 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Tengah, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar

61.18% sedangkan 38.82% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator satuan inovasi daerah yang memiliki tingkat keterisian data pendukung yang paling besar adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah yaitu sebesar 65%. Hal tersebut berarti bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Tengah telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu indikator Replikasi sebesar 0% yang artinya 17 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Tengah tidak terisi data pendukung dari indikator tersebut.

### i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 43 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah

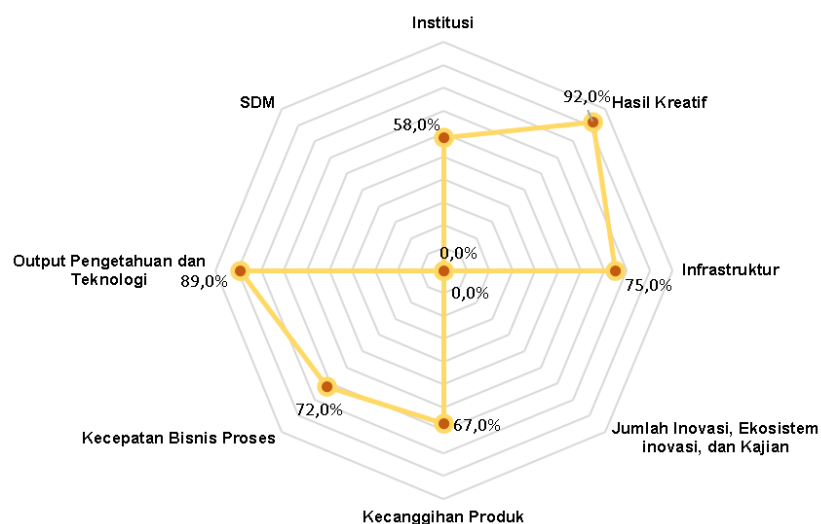
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa terdapat indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi yaitu indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan, Kualitas Inovasi Daerah, Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan, Dukungan Anggaran, dan Bimtek Inovasi. Artinya bahwa inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pedoman Teknis yaitu sebesar 50% artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Kecepatan Inovasi yaitu sebesar 70% artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

## j. Daftar Inovasi Kabupaten Lombok Tengah beserta Skor Kematangannya

Tabel 5 Daftar Inovasi Kabupaten Lombok Tengah beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Masyarakat Desaku Aman, Ekonomi Lancar, Hidup Ten tram	0
Langkah Baru Kuta Mandalika	0
Aman dan Nyaman di Kotaku	0
Ikhtiar Usahaku Lancar	0
Rumah Makanku Sehat	0
Langkahmu, Kusampaikan	0
#BelanjaSehat	15
E-Monev Kabupaten Lombok Tengah	91
SILAK	71
SIDATu Mobile	55
Rahman Rahim Day	71
GESIT Transportasi Online Lombok	55
Sistem Kesiapsiagaan Pertanian dan Bencana (SKPB) Lombok Tengah	65
INOVASI PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. LOMBOK TENGAH	61
Pelayanan Administrasi Kependudukan One Day Service (ODC)	104
Pelayanan Terintegrasi (Paket Hemat Adminduk) Two in One Three in One	108
Lapak Kuliner Khas Pasar Bambu Bonjeruk	112

## E. KABUPATEN LOMBOK TIMUR

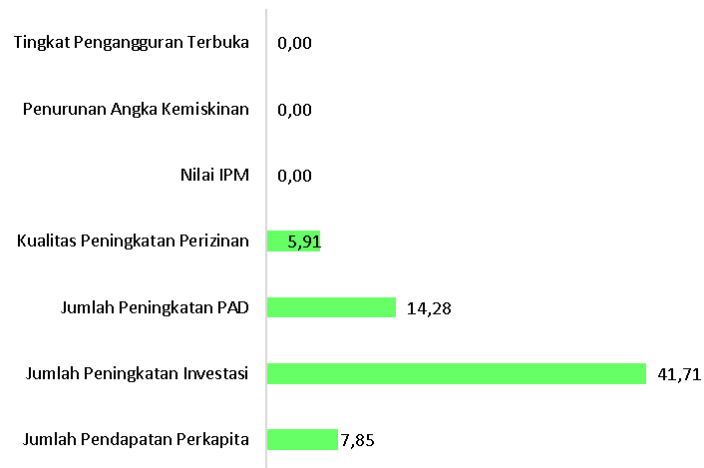


Gambar 44 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Lombok Timur memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu sebesar 92.00%. Artinya secara umum

indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Institusi lebih rendah daripada variabel lainnya, yaitu sebesar 58.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 45 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lombok Timur

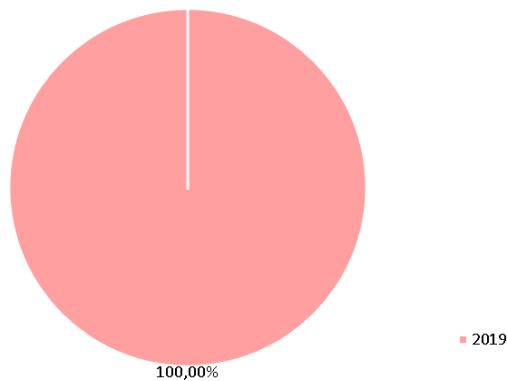
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lombok Timur belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, Penurunan Angka Kemiskinan, dan Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia bernilai 0% karena tidak ada data yang diinput oleh Kabupaten Lombok Timur terkait dengan indikator-indikator tersebut. Selanjutnya, indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 5.91%, dimana nilai tersebut hampir sama dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengalami kenaikan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 14.28% dimana nilai tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya menunjukkan kenaikan sebesar 8%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang juga mengalami kenaikan sebesar 41.71% dimana nilai tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 0.45%. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Lombok Timur ternyata juga mengalami kenaikan sebesar 7.85%, dimana nilai tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 1.85%.



## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

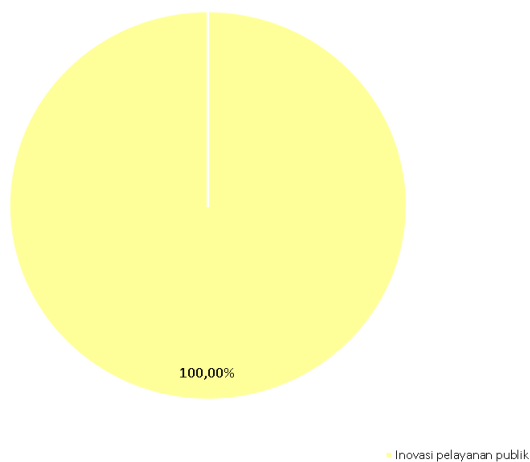
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 46 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Lombok Timur

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Timur telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 1 (100%) inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2019. Sedangkan untuk inovasi yang diterapkan pada tahun 2020 belum terlaporkan.

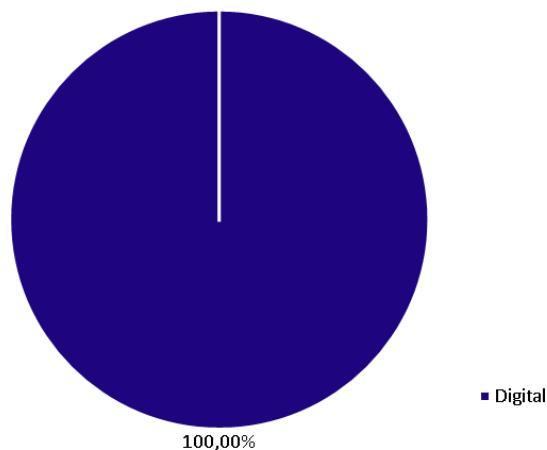
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 47 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 1 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Timur, yaitu inovasi pelayanan publik. Sedangkan untuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah belum terlaporkan.

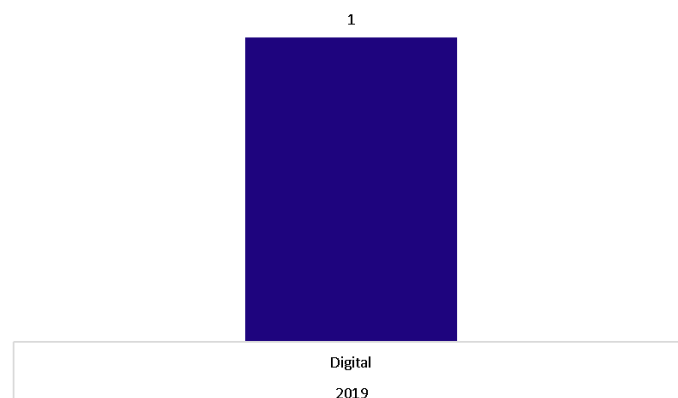
### c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 48 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Lombok Timur

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 1 (100%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Timur merupakan inovasi digital, sedangkan untuk jenis inovasi non digital dan inovasi teknologi belum dilaporkan.

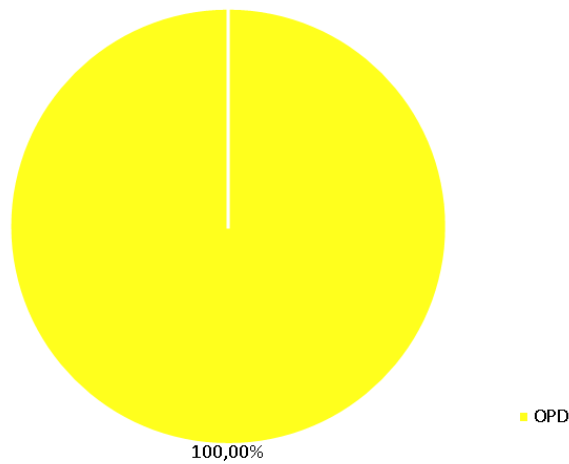
### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 49 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Lombok Timur

Secara umum jumlah inovasi tidak terdapat peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, karena inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Timur hanya satu jenis inovasi yaitu inovasi digital yang diterapkan pada tahun 2019. Sedangkan untuk jenis inovasi non digital dan teknologi serta inovasi yang diterapkan pada tahun 2020 belum dilaporkan.

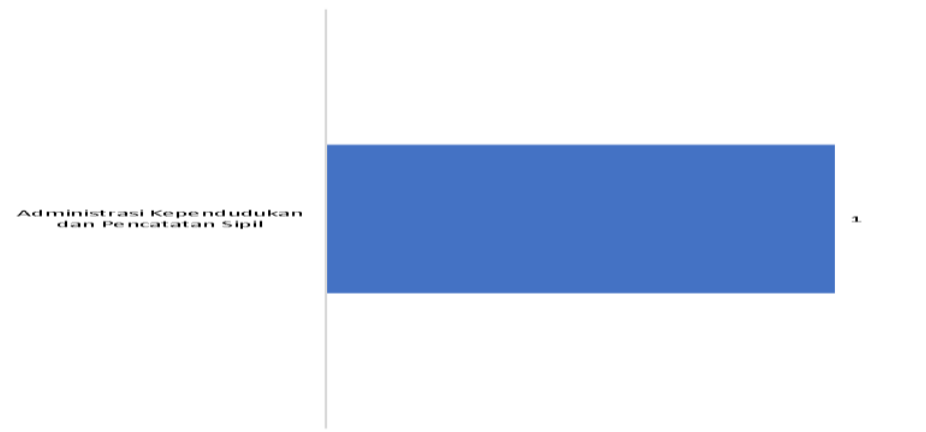
#### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 50 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Lombok Timur

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2021 hanya diinisiasi oleh Perangkat Daerah yaitu sejumlah 1 (100%) inovasi. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh Masyarakat, Kepala Daerah, ASN dan DPRD belum dilaporkan pada tahun 2021.

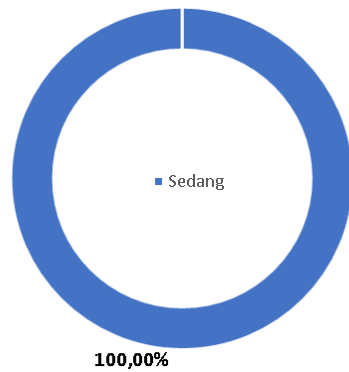
#### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 51 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Lombok Timur

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Lombok Timur berdasarkan urusan pemerintahan masih belum merata karena hanya mencakup 1 dari 32 urusan pemerintahan yang ada yaitu urusan dukcapil. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, dapat dilihat bahwa inovasi pada 6 urusan wajib pelayanan dasar masih belum dilaporkan.

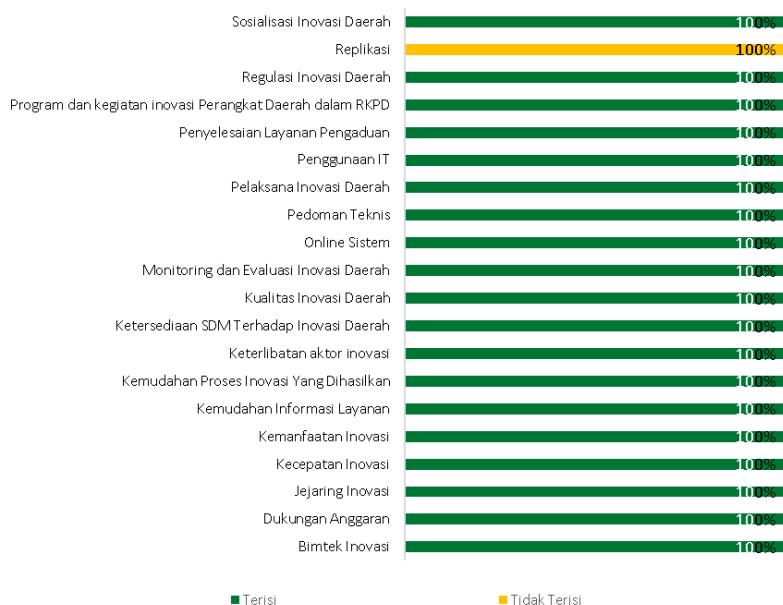
### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 52 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Lombok Timur

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Timur sejumlah 1 (100%) inovasi memiliki skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



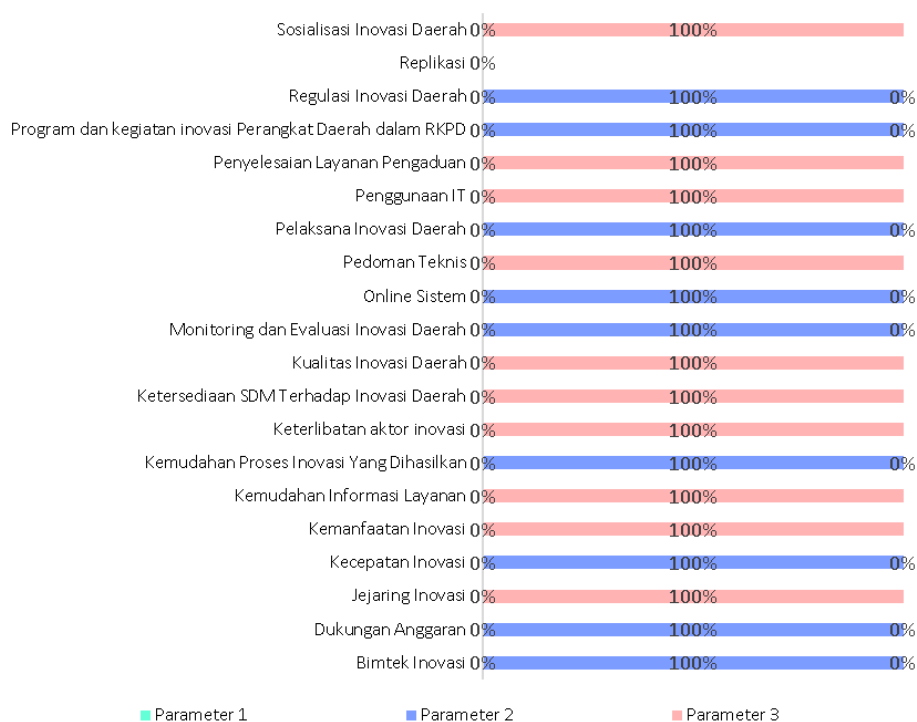
Gambar 53 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Timur

Dari 1 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Timur, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar

5.00% sedangkan 95.00% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator satuan inovasi daerah yang memiliki tingkat keterisian data pendukung yang paling besar adalah hampir keseluruhan dari indikator tersebut kecuali indikator Replikasi yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Timur telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu indikator Replikasi sebesar 0% yang artinya inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Timur tidak terisi data pendukung dari indikator tersebut.

### i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 54 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Timur

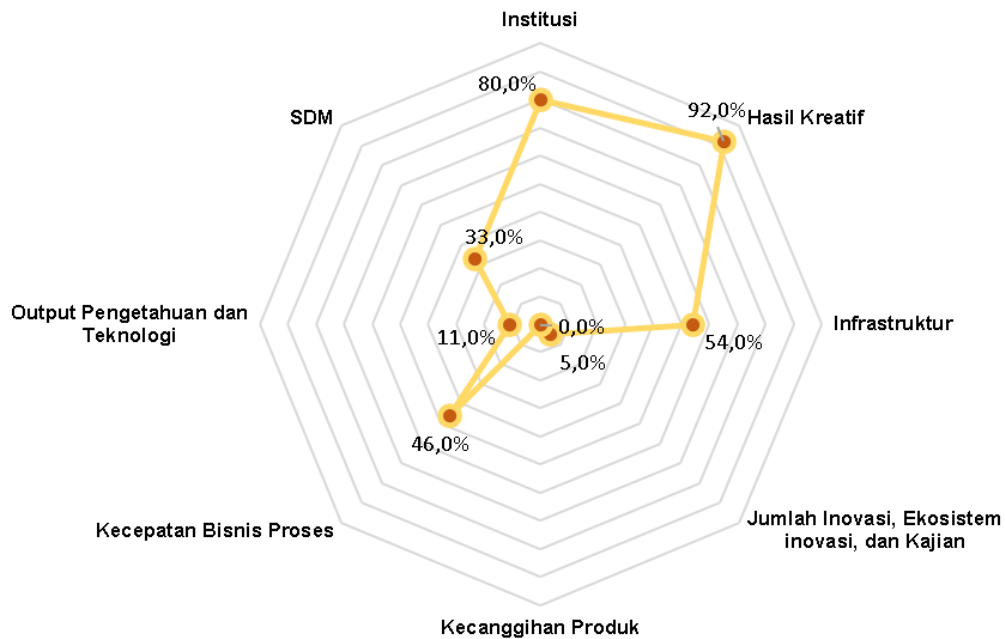
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa terdapat indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi yaitu indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penggunaan IT, Pedoman Teknis, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, dan Jejaring Inovasi sebesar 100%. Artinya bahwa inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator-indikator satuan inovasi daerah kecuali yang disebutkan diatas yaitu sebesar 100% artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua.

**j. Daftar Inovasi Kabupaten Lombok Timur beserta Skor Kematangannya**

Tabel 6 Daftar Inovasi Kabupaten Lombok Timur beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
BUAT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE (BAKSO)	62

**F. KABUPATEN LOMBOK UTARA**



Gambar 55 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Lombok Utara memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu sebesar 92.00%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 5.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 56 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lombok Utara

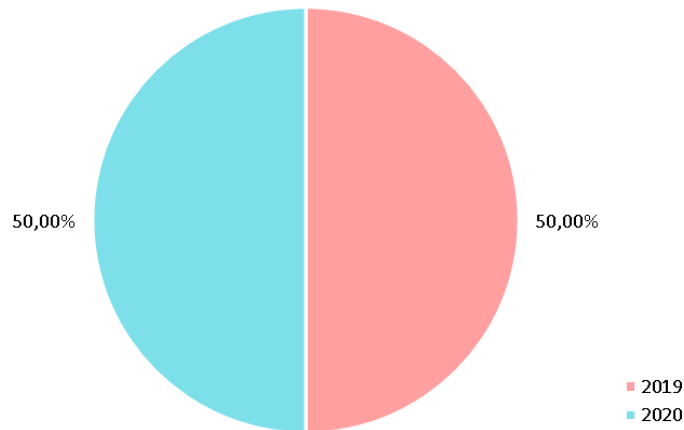
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Lombok Utara belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.90%, dimana nilai tersebut hampir mendekati standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 2.04%, dimana angka tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik 0.02%. Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami penurunan sebesar 0.07% dimana nilai tersebut sedikit lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan ternyata mengalami kenaikan sebesar 323.89%, nilai tersebut memiliki selisih yang sangat jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 5%. Namun kemungkinan nilai yang diinput dari indikator tersebut tidak sesuai dengan yang diminta oleh sistem aplikasi indeks inovasi daerah.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengalami kenaikan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 13.08% dimana nilai tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan kenaikan sebesar 8%. Namun berbeda dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang mengalami penurunan sebesar 55.87% dimana nilai tersebut jauh lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0.45%. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Lombok Utara

yang menunjukkan kenaikan sebesar 4.40%, dimana nilai tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

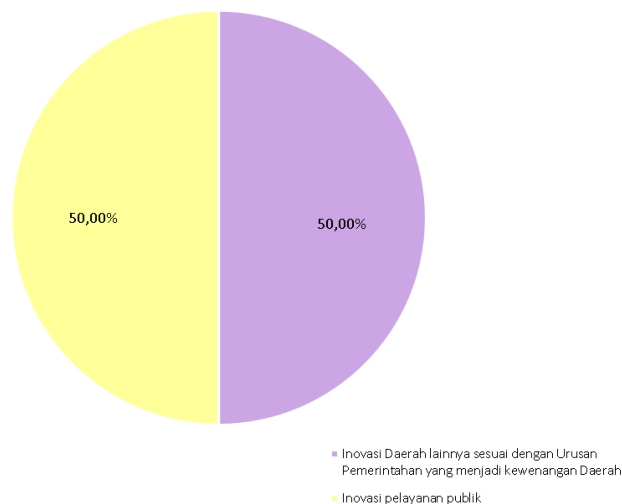
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 57 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Lombok Utara

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Utara telah diterapkan pada tahun 2020 dan 2019. Terdapat 1 (50.00%) inovasi dari 2 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2020 dan sisanya 1 (50.00%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

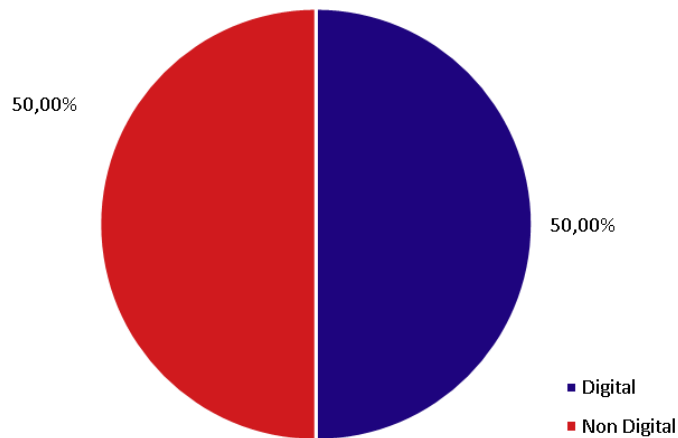


Gambar 58 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Utara, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan untuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah belum dilaporkan.



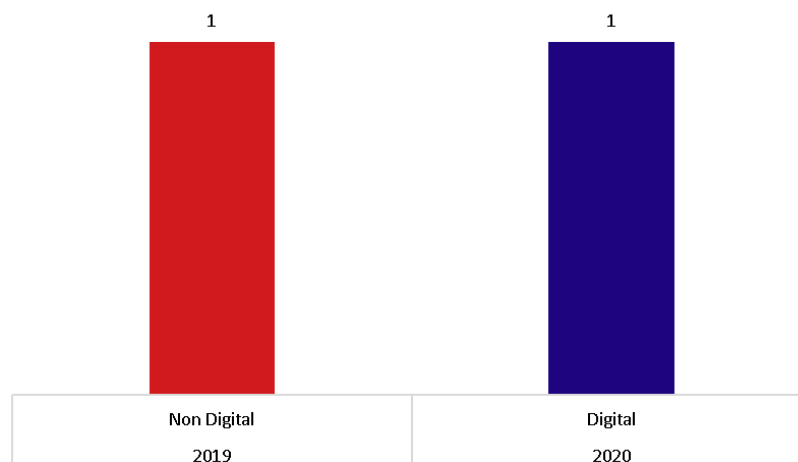
### c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 59 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Lombok Utara

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 1 (50%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Utara merupakan inovasi digital, kemudian 1 (50%) inovasi daerah lainnya merupakan inovasi non digital sedangkan untuk jenis inovasi teknologi belum dilaporkan.

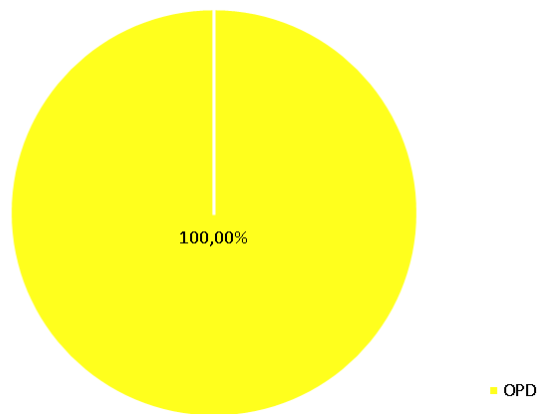
### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 60 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Lombok Utara

Secara umum jumlah inovasi tidak terdapat peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, karena inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Utara hanya satu jenis inovasi yaitu inovasi non digital yang diterapkan pada tahun 2019 dan satu jenis inovasi yaitu inovasi digital yang diterapkan pada tahun 2020. Sedangkan untuk jenis inovasi digital dan teknologi yang diterapkan pada tahun 2019 serta inovasi non digital dan teknologi yang diterapkan pada tahun 2020 belum dilaporkan.

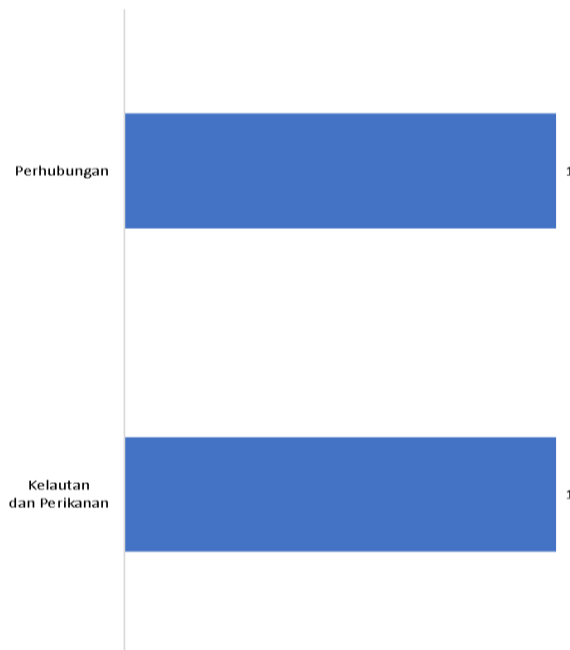
#### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 61 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Lombok Utara

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2021 hanya diinisiasi oleh Perangkat Daerah yaitu sejumlah 2 (100%) inovasi. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh Masyarakat, Kepala Daerah, ASN dan DPRD belum dilaporkan pada tahun 2021.

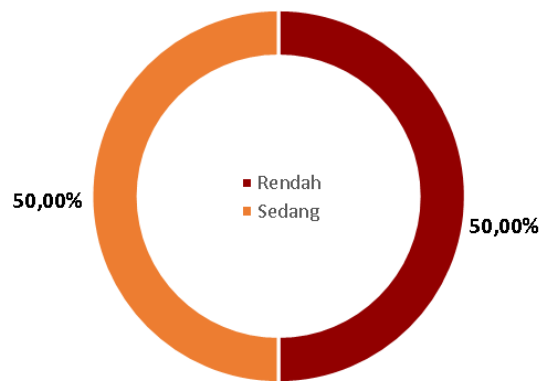
#### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 62 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Lombok Utara

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Lombok Utara berdasarkan urusan pemerintahan masih belum merata karena hanya mencakup 2 dari 32 urusan pemerintahan yang ada yaitu urusan perhubungan serta kelautan dan perikanan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, dapat dilihat bahwa inovasi pada 6 urusan wajib pelayanan dasar masih belum terlaporkan.

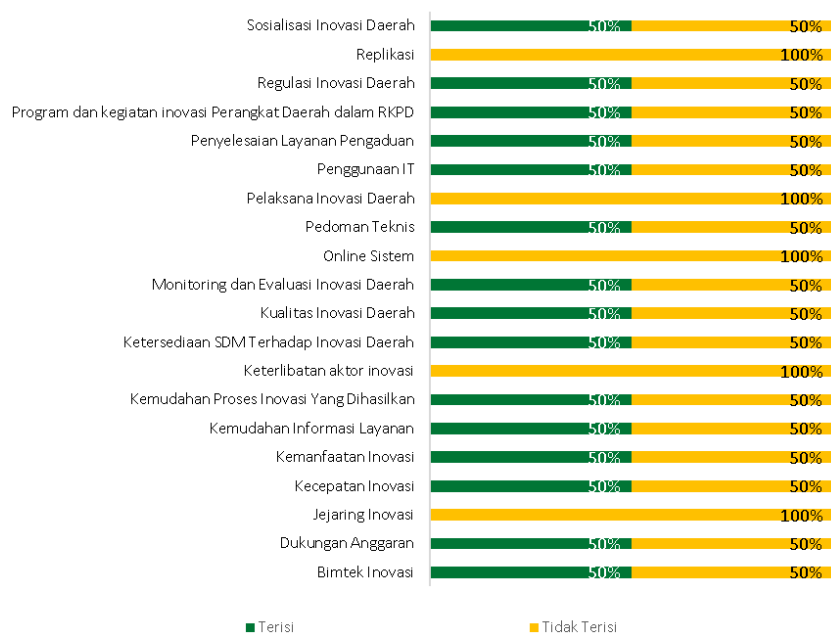
### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 63 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Lombok Utara

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Utara sejumlah 2 (100%) inovasi memiliki skor kematangan rendah dan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



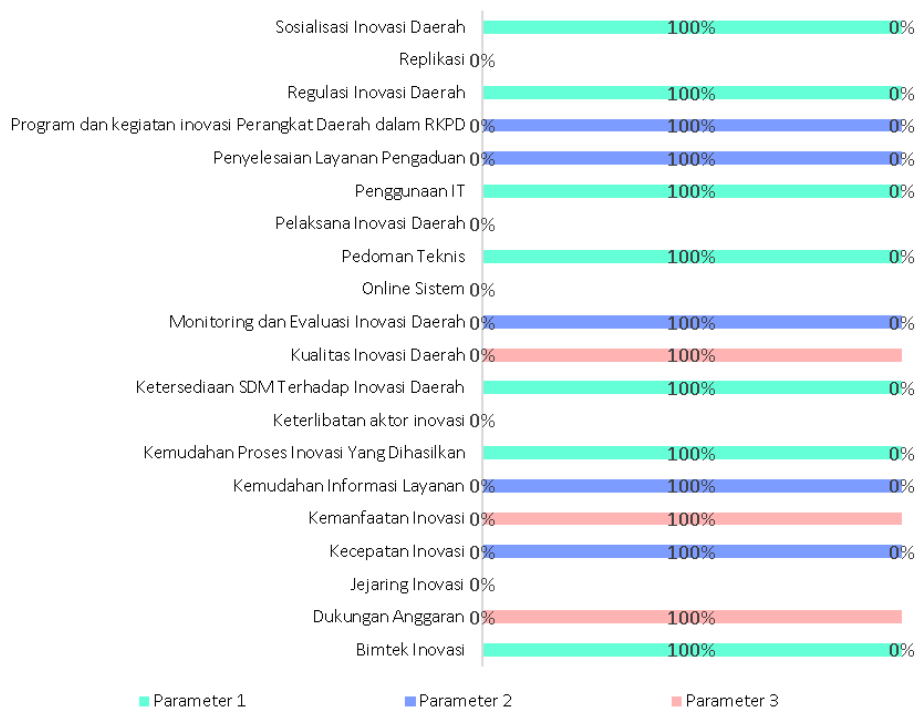
Gambar 64 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Utara

Dari 2 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Utara, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar

62.50% sedangkan 37.50% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator satuan inovasi daerah yang memiliki tingkat keterisian data pendukung yang paling besar yaitu 100% adalah hampir keseluruhan dari indikator tersebut kecuali indikator Replikasi, Pelaksana Inovasi Daerah, Online Sistem, Keterlibatan Aktor Inovasi, dan Jejaring Inovasi. Hal ini berarti bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Utara telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu indikator Replikasi, Pelaksana Inovasi Daerah, Online Sistem, Keterlibatan Aktor Inovasi, dan Jejaring Inovasi sebesar 0% yang artinya inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Lombok Utara tidak terisi data pendukung dari indikator tersebut.

### i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 65 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Utara

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa terdapat indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi yaitu indikator Kualitas Inovasi Daerah, Kemanfaatan Inovasi, dan Dukungan Anggaran sebesar 100%. Artinya bahwa inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKP, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Kemudahan Informasi Layanan, dan Kecepatan Inovasi yaitu sebesar 100% artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Sedangkan, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Regulasi Inovasi Daerah,

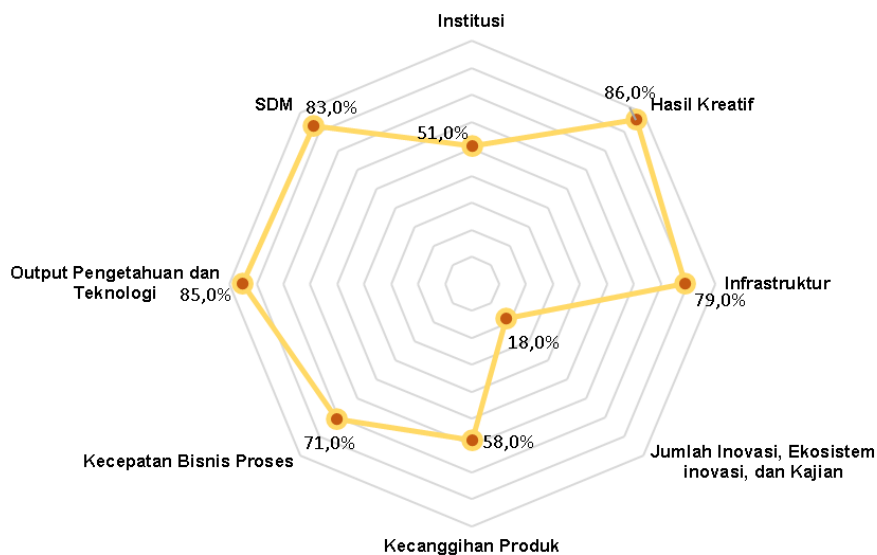
Penggunaan IT, Pedoman Teknis, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, dan Bimtek Inovasi yaitu sebesar 100% artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

**j. Daftar Inovasi Kabupaten Lombok Utara beserta Skor Kematangannya**

Tabel 7 Daftar Inovasi Kabupaten Lombok Utara beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
BUDIDAYA UDANG VANAME SISTEM KOLAM BUNJAR BAGI PEREMPUAN MISKIN PESISIR KABUPATEN LOMBOK UTARA (BUDAME MISKIN)	82
Pemberitahuan dan Pendaftaran Online Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	0

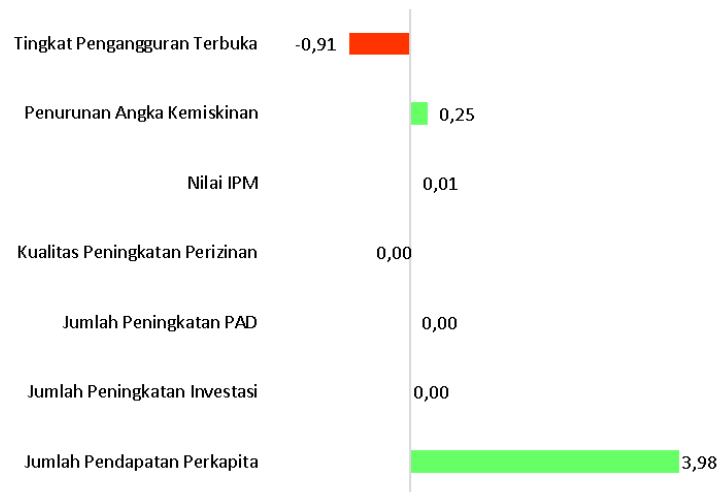
**G. KABUPATEN SUMBAWA**



Gambar 66 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Sumbawa memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu sebesar 86.00%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 18.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



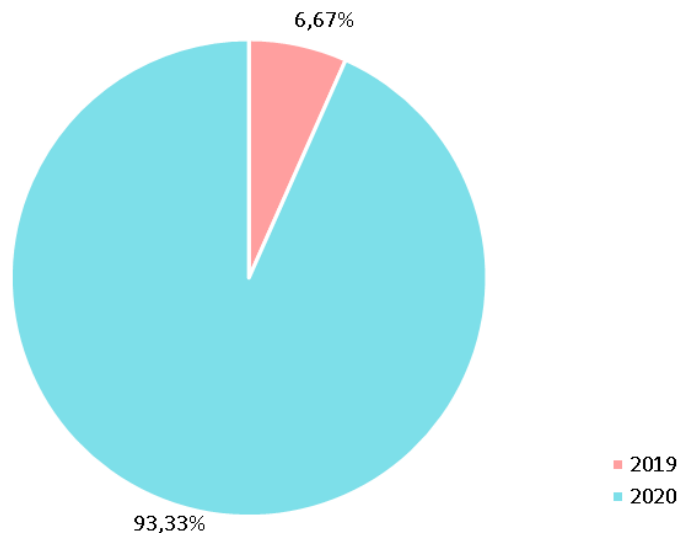
Gambar 67 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumbawa

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumbawa belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.91%, dimana nilai tersebut hampir mendekati standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.25%, dimana angka tersebut ternyata lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik 0.02%. Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami kenaikan sebesar 0.01% dimana nilai tersebut sedikit lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, indikator Kualitas Peningkatan Perizinan ternyata tidak terisi data karena bernilai 0.00% yang artinya bahwa Kabupaten Sumbawa tidak menginput data jumlah perizinan tahun 2019 dan 2020 ke dalam sistem aplikasi indeks inovasi daerah.

Untuk indikator Jumlah Peningkatan PAD ternyata juga bernilai 0.00% yang artinya bahwa Kabupaten Sumbawa tidak menginput data PAD tahun 2019 dan 2020 ke dalam sistem aplikasi indeks inovasi daerah. Sama halnya dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang tidak terisi data karena bernilai 0.00% yang artinya bahwa Kabupaten Sumbawa tidak menginput data investasi tahun 2019 dan 2020 ke dalam sistem aplikasi indeks inovasi daerah. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Sumbawa yang menunjukkan kenaikan sebesar 3.98%, dimana nilai tersebut ternyata jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

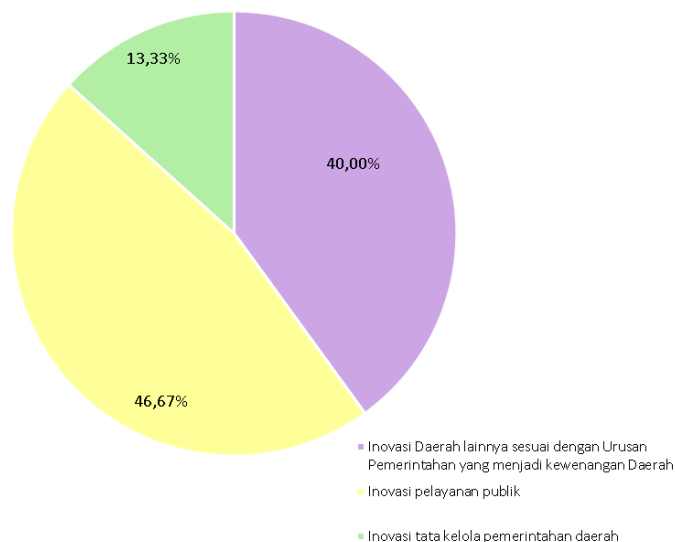
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 68 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sumbawa

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumbawa telah diterapkan pada tahun 2020 dan 2019. Terdapat 1 (6.67%) inovasi dari 15 inovasi yang dilaporkan tersebut telah diterapkan sejak tahun 2019 dan sisanya 14 (93.33%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

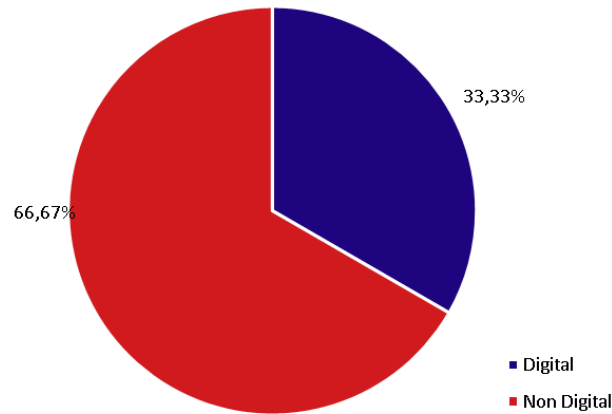


Gambar 69 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 (tiga) bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumbawa, yaitu inovasi pelayanan publik sejumlah 7 (46.67%) inovasi, inovasi

daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sejumlah 6 (40.00%) inovasi serta inovasi tata kelola pemerintahan daerah sejumlah 2 (13.33%) inovasi.

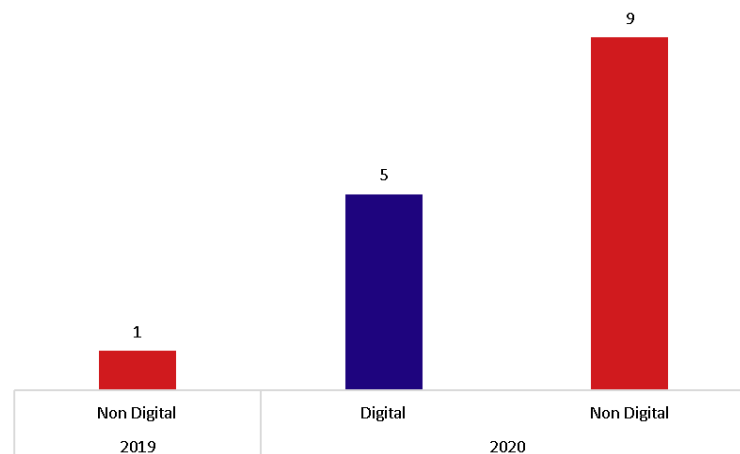
### c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 70 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sumbawa

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 5 (33.33%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumbawa merupakan inovasi digital, kemudian 10 (66.67%) inovasi daerah lainnya merupakan inovasi non digital sedangkan untuk jenis inovasi teknologi belum dilaporkan.

### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



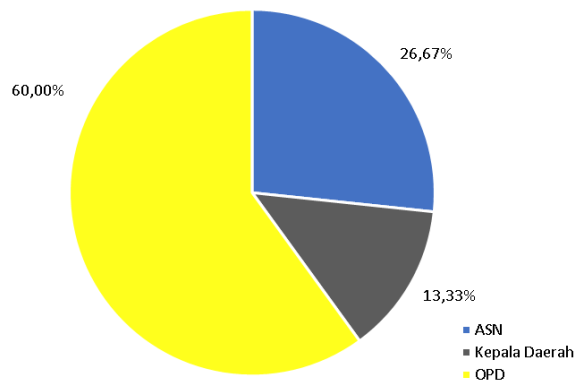
Gambar 71 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sumbawa

Secara umum, jumlah inovasi terdapat peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumbawa hanya satu jenis inovasi yaitu inovasi non digital yang diterapkan pada tahun 2019 kemudian meningkat menjadi 9 inovasi yang diterapkan pada tahun 2020. Sedangkan untuk jenis inovasi digital dan teknologi yang diterapkan pada tahun 2019 belum dilaporkan namun pada tahun 2020 telah diterapkan jenis inovasi digital



sejumlah 5 inovasi. Untuk jenis inovasi teknologi yang diterapkan pada tahun 2020 belum terlaporkan.

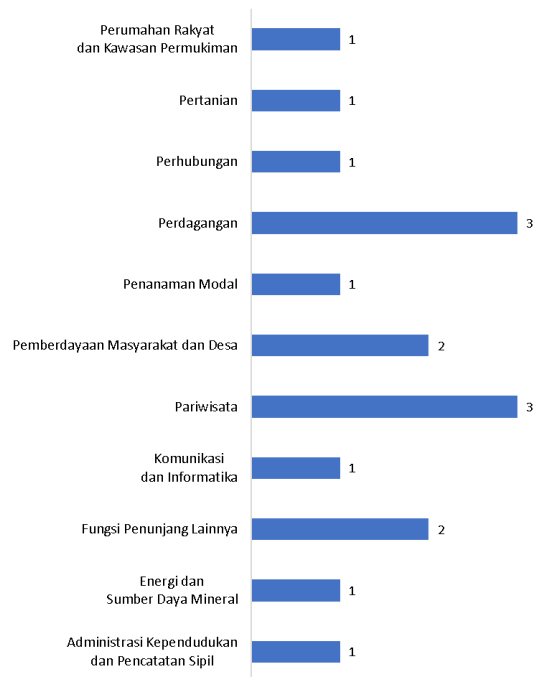
**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



Gambar 72 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sumbawa

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumbawa pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah yaitu sejumlah 9 (60.00%) inovasi, kemudian diinisiasi oleh Kepala Daerah sejumlah 2 (13.33%) inovasi serta diinisiasi oleh ASN sejumlah 4 (26.67%) inovasi. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh Masyarakat dan DPRD belum dilaporkan pada tahun 2021.

**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

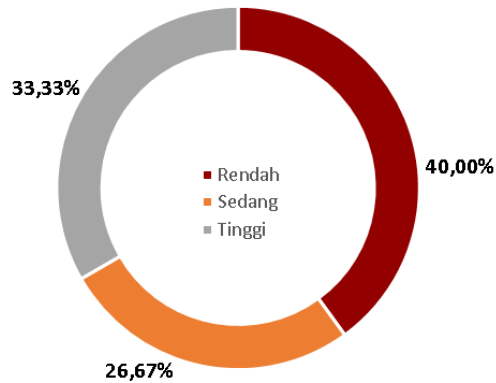


Gambar 73 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sumbawa

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Sumbawa berdasarkan urusan pemerintahan sudah cukup merata karena mencakup 11 dari 32 urusan pemerintahan yang ada. Sebagian besar

urusan inovasi adalah inovasi pada urusan pariwisata dan perdagangan yaitu sejumlah 3 inovasi kemudian urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta fungsi penunjang lainnya sejumlah 2 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 1 (satu) dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan 1 inovasi.

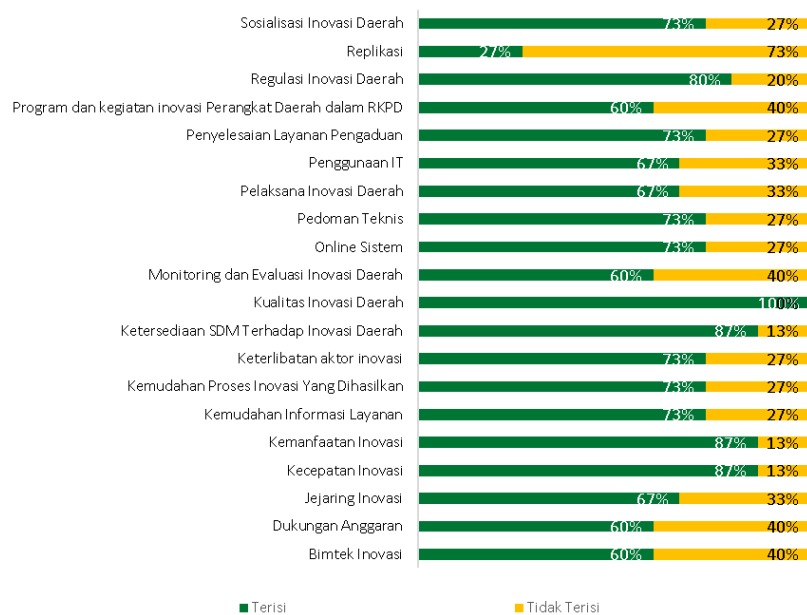
#### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 74 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sumbawa

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumbawa sejumlah 6 (40.00%) inovasi memiliki skor kematangan yang rendah, kemudian 4 (26.67%) inovasi memiliki skor kematangan sedang serta 5 (33.33%) inovasi memiliki skor kematangan yang tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

## h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

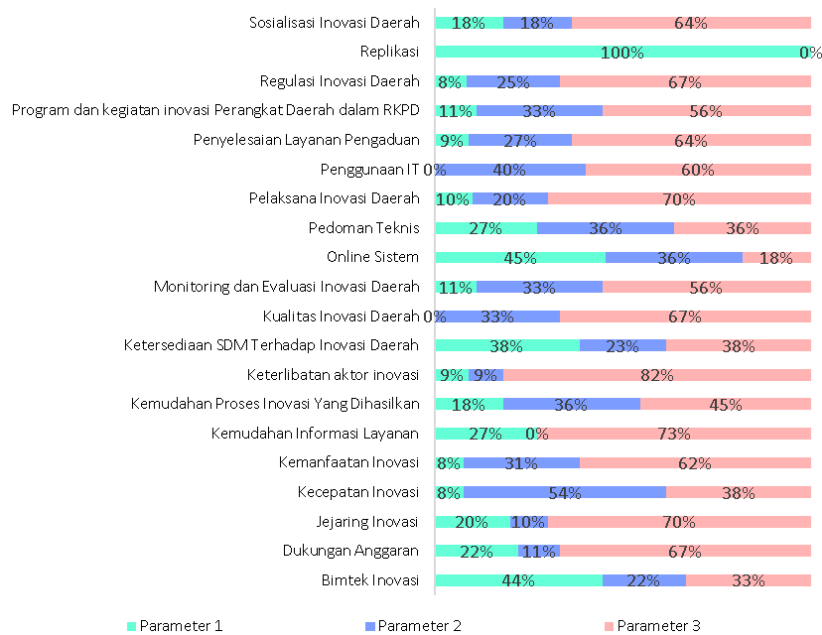


Gambar 75 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa

Dari 15 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumbawa, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 29.00% sedangkan 71.00% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator satuan inovasi daerah yang memiliki tingkat keterisian data pendukung yang paling besar adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah yaitu sebesar 100%. Hal tersebut berarti bahwa semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumbawa telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu indikator Replikasi sebesar 27% yang artinya hanya terdapat 4 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumbawa telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

## i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 76 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa terdapat indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi yaitu indikator Keterlibatan Aktor Inovasi yaitu sebesar 82%. Artinya bahwa inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Kecepatan Inovasi yaitu sebesar 54%, artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 100%, artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

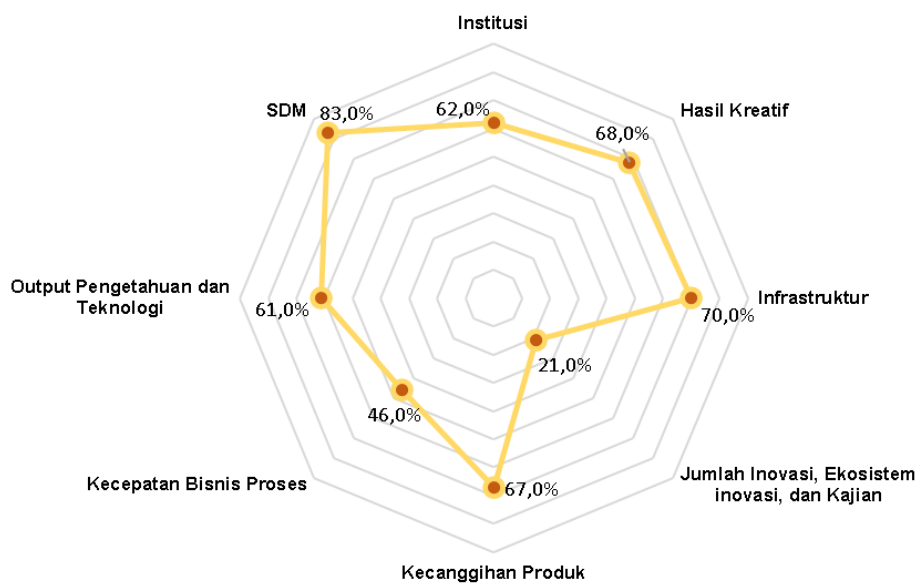
## j. Daftar Inovasi Kabupaten Sumbawa beserta Skor Kematangannya

Tabel 8 Daftar Inovasi Kabupaten Sumbawa beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Pasarnya Tradisional, Transaksinya New Normal	31
Tatanan Normal Baru di Bidang Perizinan (DPMPTS)	55
New Normal Tourism di Kabupaten Sumbawa	73
New Normal Sektor Transportasi Umum Kabupaten Sumbawa	15
Pasar Modern Bebas Covid	15
Hotel sehat bebas Covid	41
Resto Aman Sehat Bebas Covid19	52
SiJINAK	136
e-Lamp	18

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Krabat	96
SIANDINI	102
Pariri Sidesa	42
KREDIT SAHABAT	134
SIGMA SUMBAWA	125
JANGO DESA	121

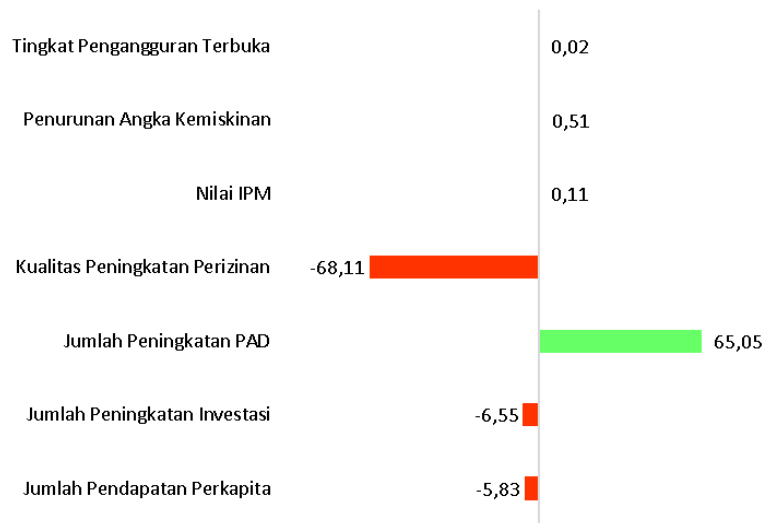
## H. KABUPATEN SUMBAWA BARAT



Gambar 77 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sumbawa Barat

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Sumbawa Barat memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu sebesar 83.00%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 21.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



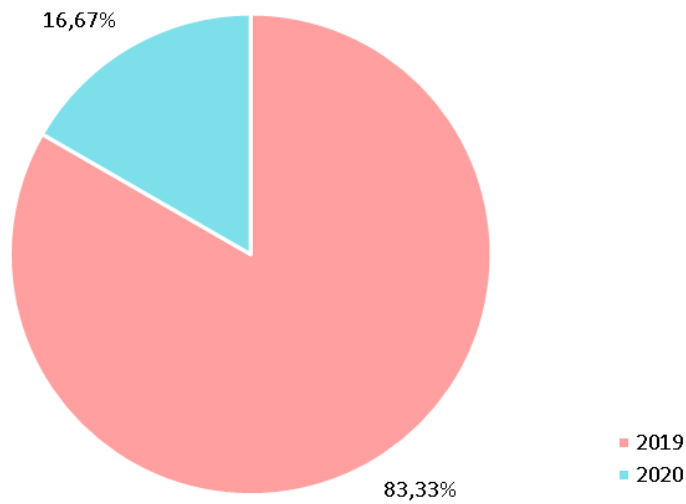
Gambar 78 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumbawa Barat

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumbawa Barat belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya kenaikan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.02%, dimana nilai tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan juga mengalami kenaikan sebesar 0.51%, dimana angka tersebut ternyata lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 0.02%. Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 0.11% dimana nilai tersebut sedikit lebih besar dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan ternyata mengalami penurunan sebesar 68.11%, dimana nilai tersebut jauh lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengalami kenaikan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 65.05% dimana nilai tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 8%. Sedangkan, indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan sebesar 6.55% dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0.45%. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Sumbawa Barat yang menunjukkan penurunan sebesar 5.83%, dimana nilai tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya hanya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

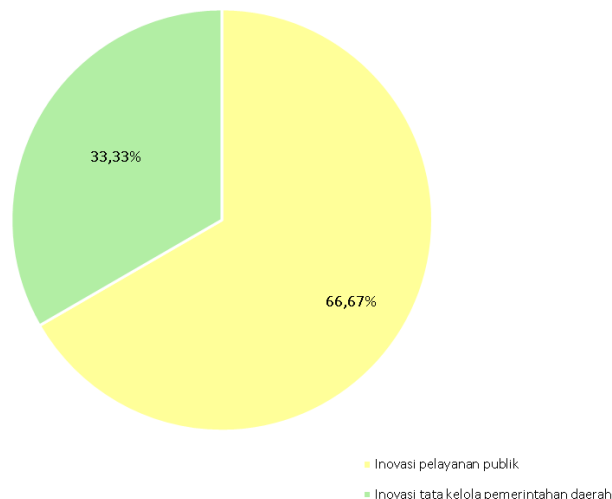
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 79 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sumbawa Barat

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat telah diterapkan pada tahun 2020 dan 2019. Terdapat 5 (83.33%) inovasi dari 6 inovasi yang dilaporkan tersebut telah diterapkan sejak tahun 2019 dan sisanya 1 (16.67%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

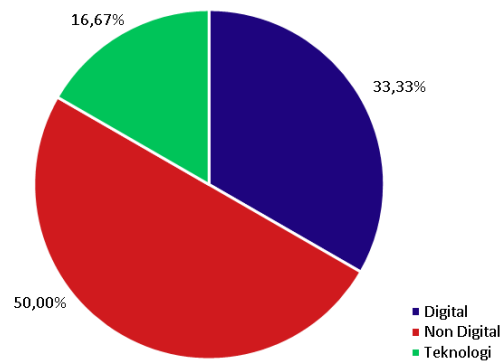


Gambar 80 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sumbawa Barat

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 2 (dua) bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu inovasi pelayanan publik sejumlah 4 (66.67%) inovasi serta inovasi tata kelola pemerintahan daerah sejumlah 2 (33.33%) inovasi. Sedangkan, inovasi

daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah belum terlaporkan.

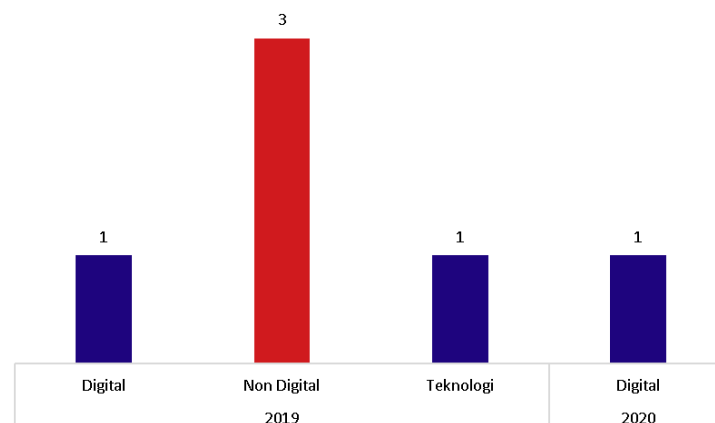
### c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 81 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sumbawa Barat

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 2 (33.33%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat merupakan inovasi digital, kemudian 3 (50.00%) merupakan inovasi non digital sedangkan 1 (16.67%) inovasi lainnya merupakan inovasi teknologi.

### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

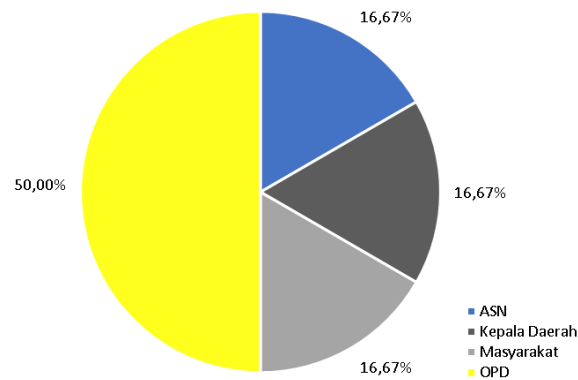


Gambar 82 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sumbawa Barat

Secara umum, jumlah inovasi tidak terdapat peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Inovasi yang terlaporkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat yaitu inovasi digital yang diterapkan pada tahun 2019 kemudian tidak mengalami peningkatan yaitu masih sejumlah 1 inovasi yang diterapkan pada tahun 2020. Sedangkan untuk jenis inovasi non digital dan teknologi yang diterapkan pada tahun 2019 sejumlah 3 inovasi non digital dan 1 inovasi teknologi. Untuk jenis inovasi teknologi dan non digital yang diterapkan pada tahun 2020 belum terlaporkan.



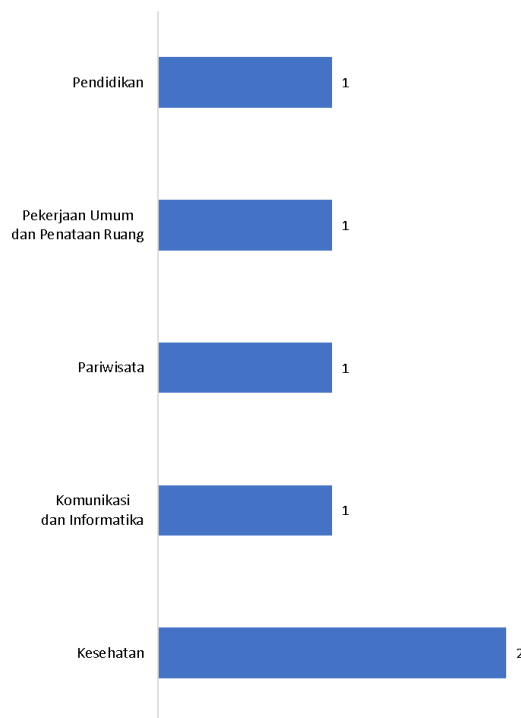
### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 83 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sumbawa Barat

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah yaitu sejumlah 3 (50.00%) inovasi, kemudian diinisiasi oleh Kepala Daerah, Masyarakat, dan ASN masing-masing sejumlah 1 (16.67%) inovasi. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan pada tahun 2021.

### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

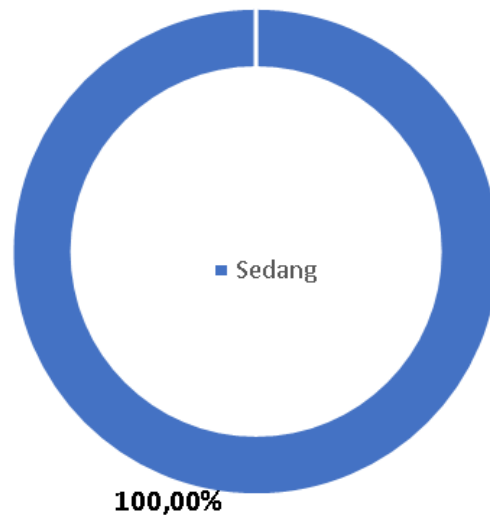


Gambar 84 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sumbawa Barat

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan urusan pemerintahan masih belum merata karena hanya mencakup 5 dari 32 urusan pemerintahan yang ada. Sebagian besar urusan inovasi adalah inovasi pada urusan kesehatan yaitu sejumlah 2

inovasi kemudian sisanya yaitu urusan Pendidikan, pariwisata, komunikasi dan informatika serta pekerjaan umum dan penataan ruang sejumlah 1 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 3 (tiga) dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 2 inovasi, pendidikan serta pekerjaan umum dan penataan ruang masing-masing dengan 1 inovasi.

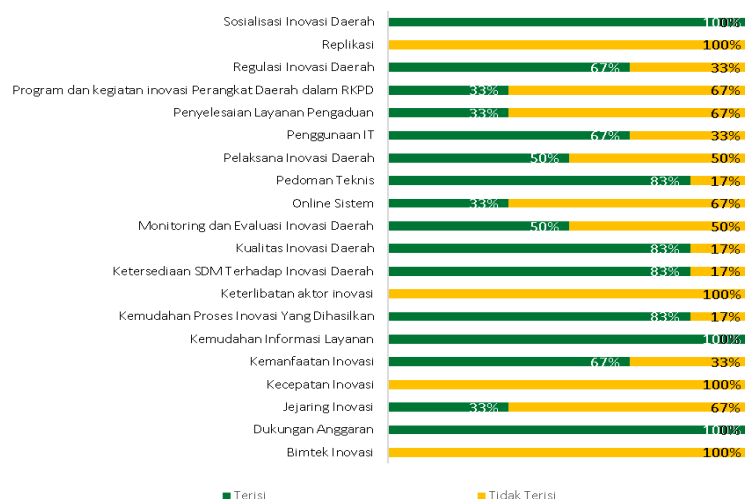
### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 85 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sumbawa Barat

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah 6 (100%) inovasi memiliki skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

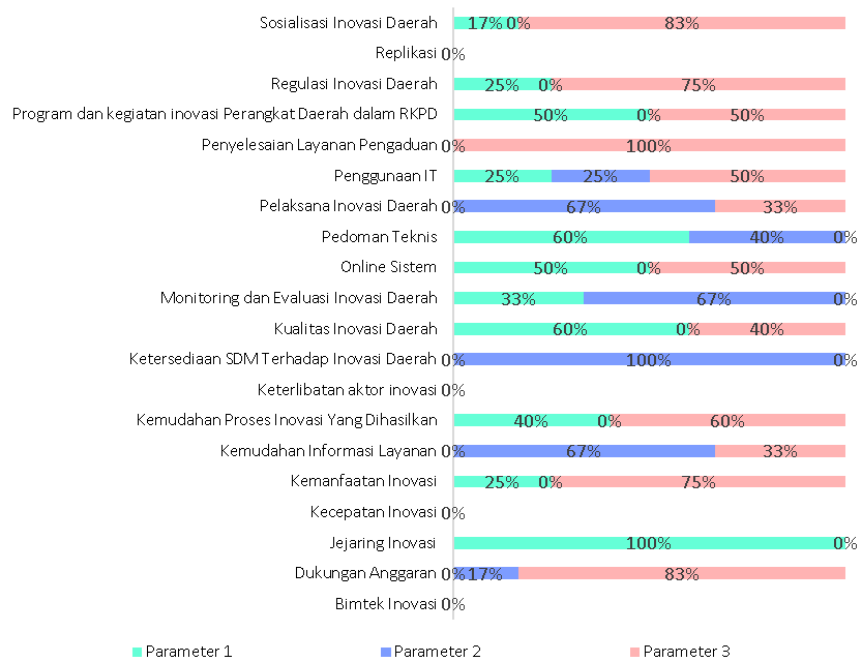


Gambar 86 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Dari 6 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 46.67% sedangkan 53.33% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator satuan inovasi daerah yang memiliki tingkat keterisian data pendukung yang paling besar adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Kemudahan Informasi Layanan, dan Dukungan Anggaran yaitu sebesar 100%. Hal tersebut berarti bahwa semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu indikator Replikasi, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kecepatan Inovasi, dan Bimtek Inovasi sebesar 0% yang artinya semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat tidak terisi data pendukung dari indikator-indikator tersebut.

### i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 87 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa terdapat indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi yaitu indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan yaitu sebesar 100%. Artinya bahwa inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah yaitu sebesar 100%, artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Jejaring Inovasi yaitu sebesar 100%,

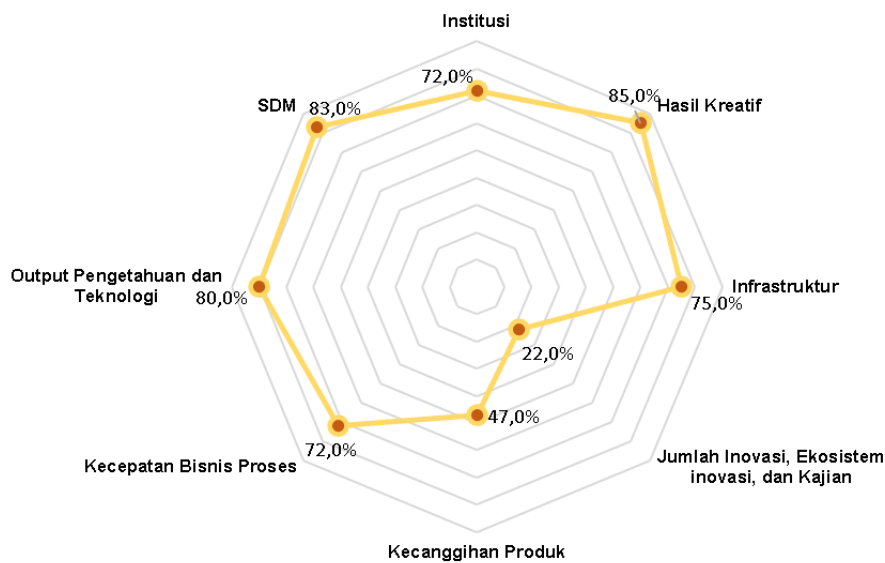
artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

**j. Daftar Inovasi Kabupaten Sumbawa Barat beserta Skor Kematangannya**

Tabel 9 Daftar Inovasi Kabupaten Sumbawa Barat beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
SISTEM INFORMASI MANTAP TATA RUANG	62
Jaringan Backbone Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	61
SPOT OLAH RAGA DESA MANTAR	59
Pendidikan Lingkungan untuk Anak tentang Pengelolaan Sampah melalui Program Si LISA MANIS (SISWA PEDULI SAMPAH MENUJU SEKOLAH NIHIL SAMPAH)	61
PELAYANAN HEMODIALISA CLBK (Care, Love and Be Healthy Kidney)	67
PROGRAM DONOR DARAH LAPANGAN TERPADU DAN TERINTEGRASI "PENOLAUNG" PelayanAN dOnor darah LuAr gedUNG	86

**I. KOTA BIMA**



Gambar 88 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Bima

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Bima memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu sebesar 85.00%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 22.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



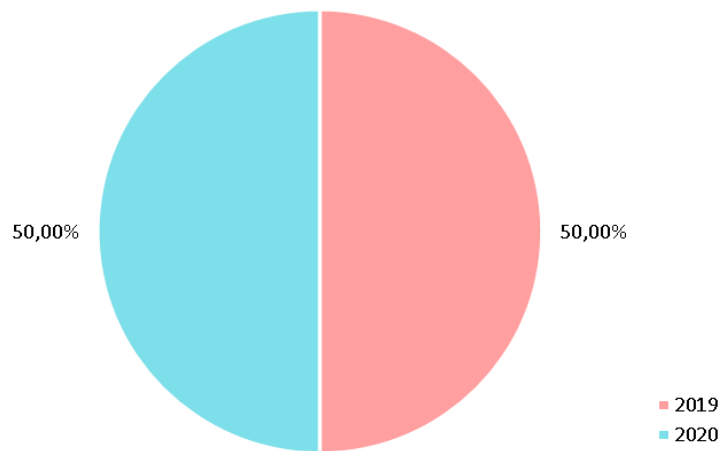
Gambar 89 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Bima

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Bima belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2.699%, dimana nilai tersebut jauh lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya turun sebesar 0.92%. Namun, kemungkinan data yang diinput tersebut tidak sesuai dengan data yang diminta oleh sistem aplikasi indeks inovasi daerah. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.19%, dimana angka tersebut ternyata lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 0.02%. Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami kenaikan sebesar 0.01% dimana nilai tersebut sedikit lebih besar dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan yang ternyata juga mengalami kenaikan sebesar 13.59%, dimana nilai tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kota Bima mengalami kenaikan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 8.53% dimana nilai tersebut sedikit lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 8%. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi juga mengalami kenaikan sebesar 33.82% dimana nilai tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 0.45%. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kota Bima yang menunjukkan penurunan sebesar 4.99%, dimana nilai tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya hanya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

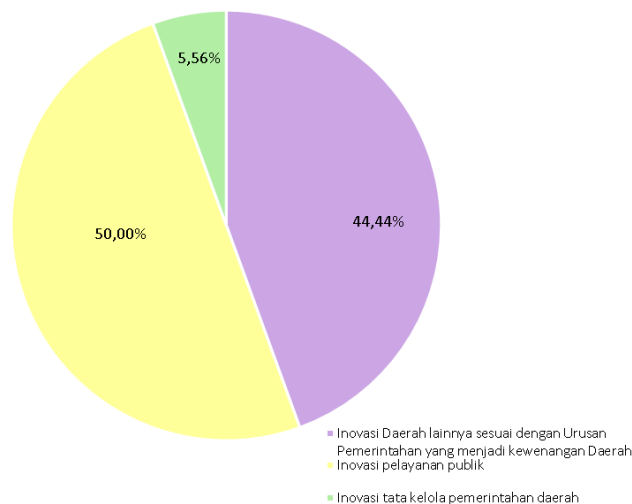
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 90 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Bima

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bima telah diterapkan pada tahun 2020 dan 2019. Terdapat 9 (50.00%) inovasi dari 18 inovasi yang dilaporkan tersebut telah diterapkan sejak tahun 2019 dan sisanya 9 (50.00%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

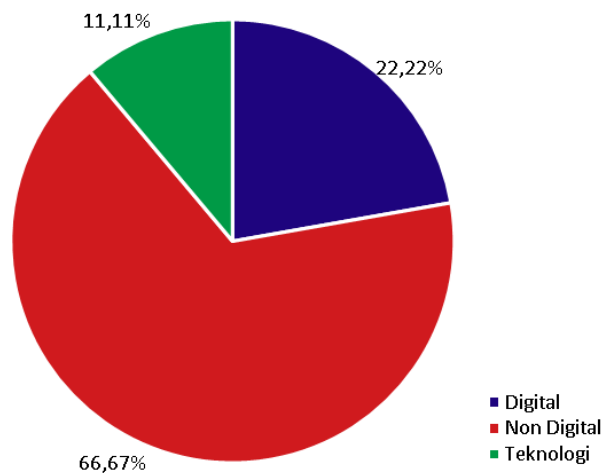
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 91 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Bima

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 (tiga) bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bima, yaitu inovasi pelayanan publik sejumlah 9 (50.00%) inovasi, inovasi tata kelola pemerintahan daerah sejumlah 1 (5.56%) inovasi, serta inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sejumlah 8 (44.44%) inovasi.

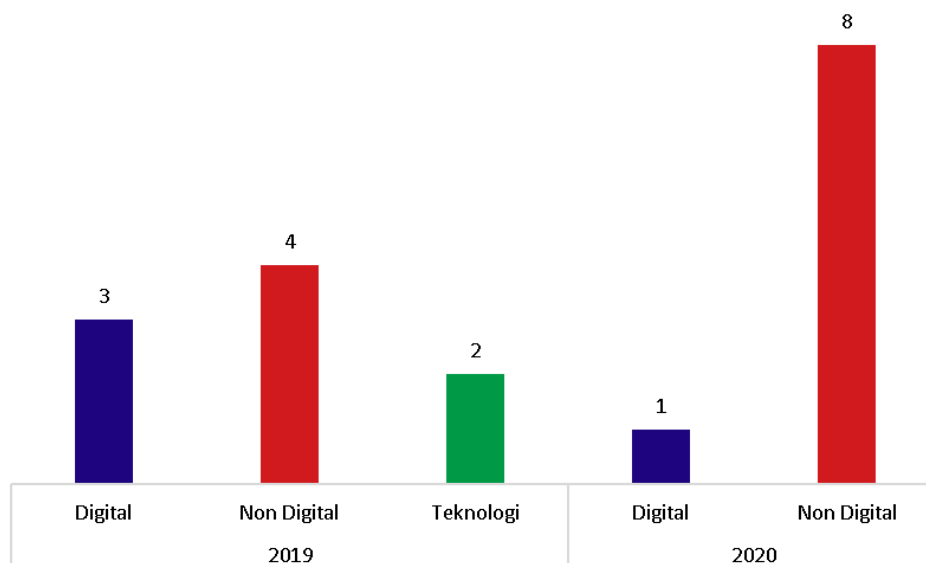
### c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 92 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Bima

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 4 (22.22%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Bima merupakan inovasi digital, kemudian 12 (66.67%) merupakan inovasi non digital sedangkan 2 (11.11%) inovasi lainnya merupakan inovasi teknologi.

### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

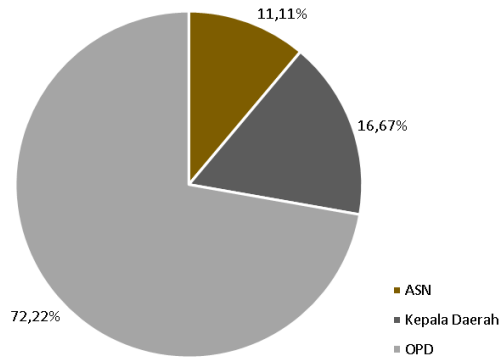


Gambar 93 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Bima

Secara umum, jumlah inovasi terdapat peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 khususnya inovasi non digital. Inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bima yaitu inovasi digital yang diterapkan pada tahun 2019 sejumlah 3 inovasi kemudian mengalami penurunan menjadi 1 inovasi yang diterapkan pada tahun 2020. Untuk jenis inovasi non digital yang diterapkan pada tahun 2019 sejumlah 4 inovasi kemudian mengalami kenaikan menjadi 8

inovasi pada tahun 2020. Sedangkan, jenis inovasi teknologi tidak mengalami perubahan jumlah dari tahun 2019 dan 2020 yaitu tetap sejumlah 2 inovasi yang diterapkan.

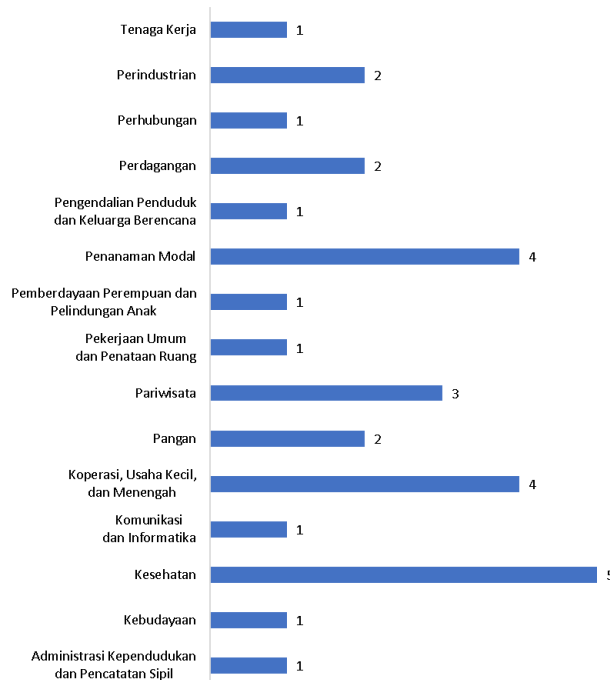
**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



Gambar 94 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Bima

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Bima pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah yaitu sejumlah 13 (72.22%) inovasi, kemudian diinisiasi oleh Kepala Daerah sejumlah 3 (16.67%) inovasi serta diinisiasi oleh ASN sejumlah 2 (11.11%) inovasi. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD dan Masyarakat belum dilaporkan pada tahun 2021.

**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



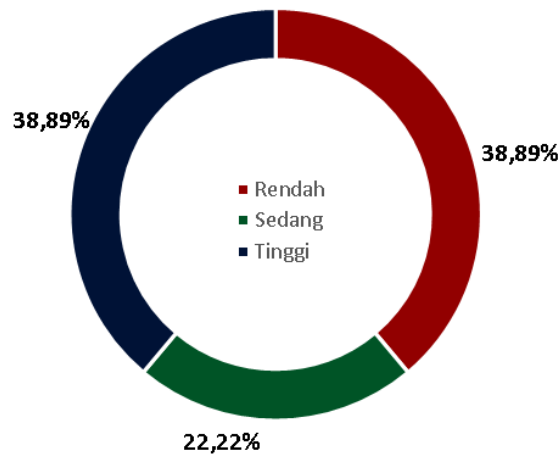
Gambar 95 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Bima

Sebaran inovasi daerah pada Kota Bima berdasarkan urusan pemerintahan masih belum cukup merata karena hanya mencakup 15 dari 32 urusan pemerintahan yang ada. Sebagian



besar urusan inovasi adalah inovasi pada urusan kesehatan yaitu sejumlah 5 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 2 (dua) dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 5 inovasi serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan 1 inovasi.

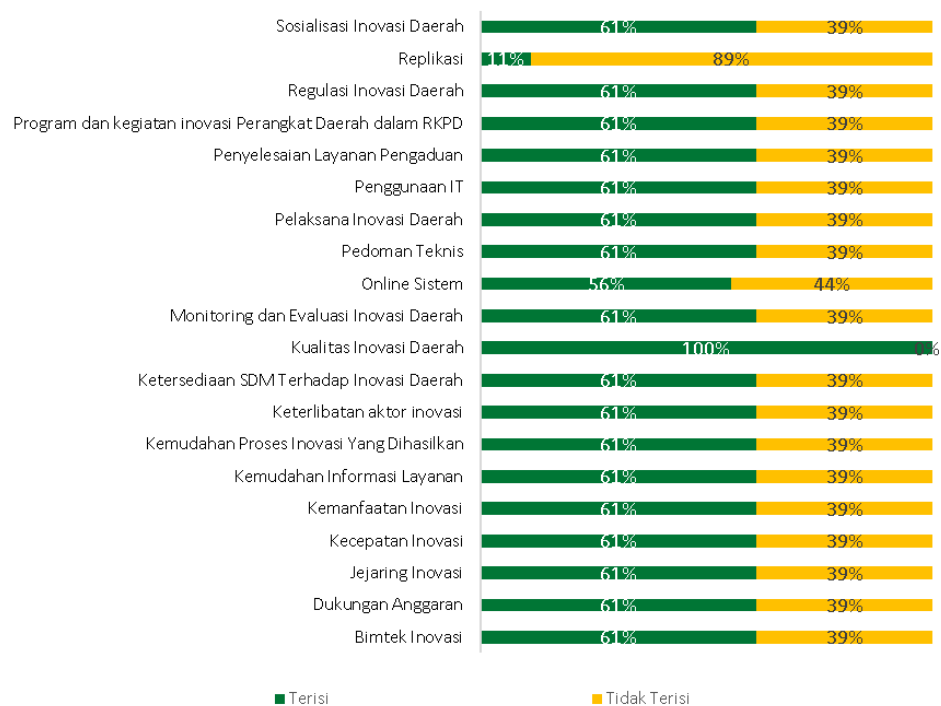
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



Gambar 96 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Bima

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bima sejumlah 7 (38.89%) inovasi memiliki skor kematangan rendah, kemudian 4 (22.22%) inovasi memiliki skor kematangan sedang serta 7 (38.89%) inovasi memiliki skor kematangan yang tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

## h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

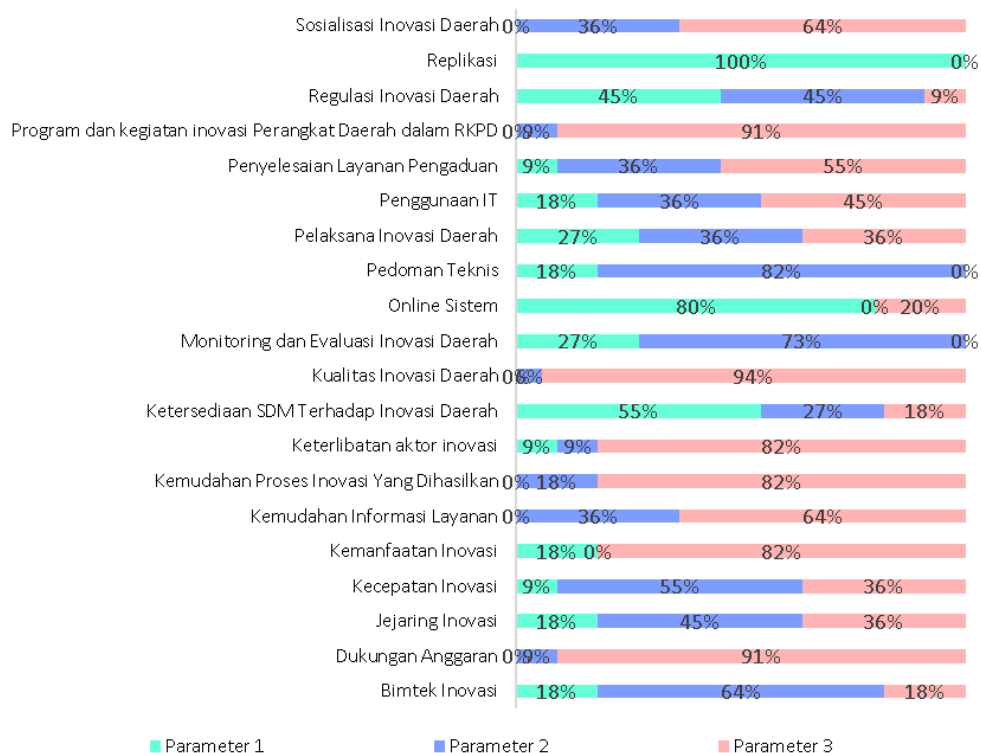


Gambar 97 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Bima

Dari 18 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bima, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 39.72% sedangkan 60.28% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator satuan inovasi daerah yang memiliki tingkat keterisian data pendukung yang paling besar adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah yaitu sebesar 100%. Hal tersebut berarti bahwa semua inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bima telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu indikator Replikasi yaitu sebesar 11% yang artinya hanya terdapat 2 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Bima yang terisi data pendukung dari indikator tersebut.

## i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 98 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kota Bima

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa terdapat indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi yaitu indikator Kualitas Inovasi Daerah yaitu sebesar 94%. Artinya bahwa inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pedoman Teknis yaitu sebesar 82%, artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 100%, artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

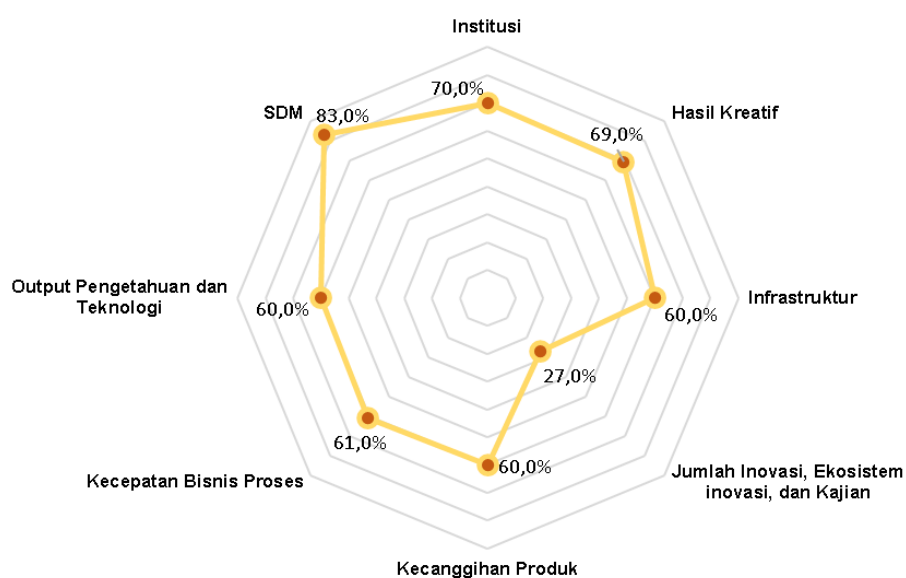
## j. Daftar Inovasi Kota Bima beserta Skor Kematangannya

Tabel 10 Daftar Inovasi Kota Bima beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pariwisata	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Tradisional	15
INOVASI DAERAH PENCEGAHAN COVID-19 PADA SEKTOR PERHOTELAN	15
INOVASI DAERAH PENCEGAHAN COVID-19 PADA SEKTOR RESTORAN/CAFE	15

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Modern	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor PTSP	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Transportasi Umum	15
BENGKEL ALKES KOTA BIMA	95
RUMAH ASPIRASI PEREMPUAN	128
POSYANTEK	114
WARDA WARTA	123
PENERAPAN TEKNOLOGI GIS BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA DETEKSI DINI KEBOCORAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM KOTA BIMA	95
KIA DAN KTP MASUK SEKOLAH	117
PERLAMBAT COVID-19 (Pemeriksaan Laboratorium Tambahan COVID-19)	93
SABERDOK (SEHARI BERSAMA DOKTER)	108
SMART CLOUD	124
JAS KU BARU (JAMU SEHAT DAN AKUPRESUR PUSKESMAS JATIBARU)	91
MBA DARA MELINTAS (Mari Bersama Kita Donorkan Darah Bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Serta Ibu Nifas Di Kota Bima)	118

## J. KOTA MATARAM



Gambar 99 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Mataram

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Mataram memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu sebesar 83.00%. Artinya secara umum

indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 27.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 100 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Mataram

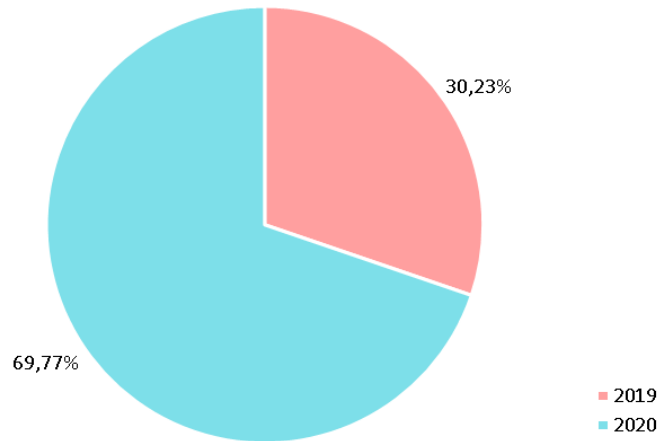
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Mataram belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar -1.55%, dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya turun sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan juga mengalami kenaikan sebesar 0.45%, dimana angka tersebut ternyata lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 0.02%. Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia mengalami penurunan sebesar 0.19% dimana nilai tersebut sedikit lebih kecil dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan ternyata mengalami kenaikan sebesar 67.55%, dimana nilai tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kota Mataram mengalami penurunan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar -2.88% dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 8%. Sedangkan, indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan sebesar 74.85% dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0.45%. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kota Mataram yang menunjukkan penurunan sebesar 5.85%, dimana nilai

tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya hanya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

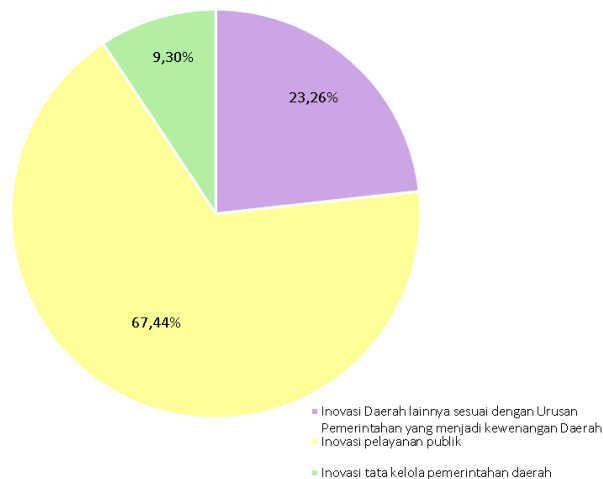
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 101 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Mataram

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kota Mataram telah diterapkan pada tahun 2020 dan 2019. Terdapat 13 (30.23%) inovasi dari 43 inovasi yang dilaporkan tersebut telah diterapkan sejak tahun 2019 dan sisanya 30 (69.77%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

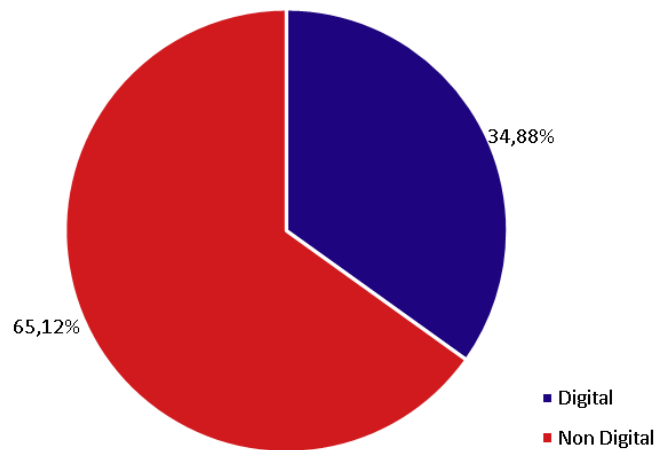
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 102 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Mataram

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 (tiga) bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kota Mataram, yaitu inovasi pelayanan publik sejumlah 29 (67.44%) inovasi inovasi tata kelola pemerintahan daerah sejumlah 4 (9.30%) inovasi, serta inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sejumlah 10 (23.26%) inovasi.

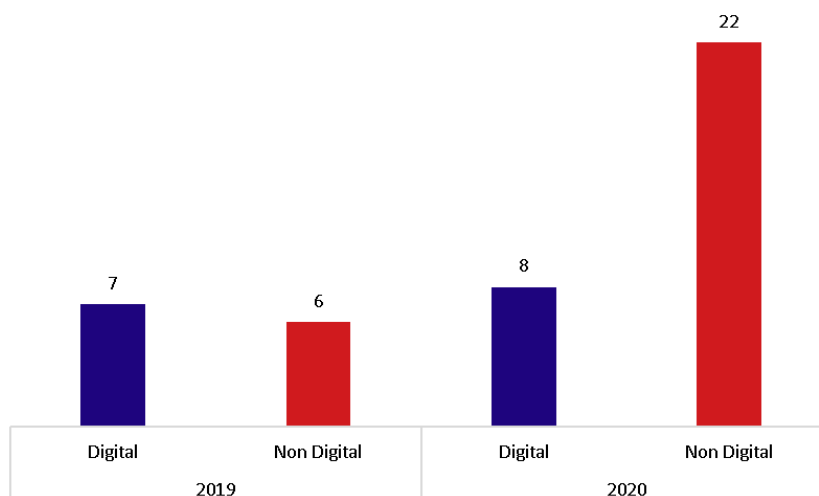
### c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 103 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Mataram

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 15 (34.88%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Mataram merupakan inovasi digital, kemudian 28 (65.12%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital sedangkan untuk inovasi teknologi belum dilaporkan tahun 2021.

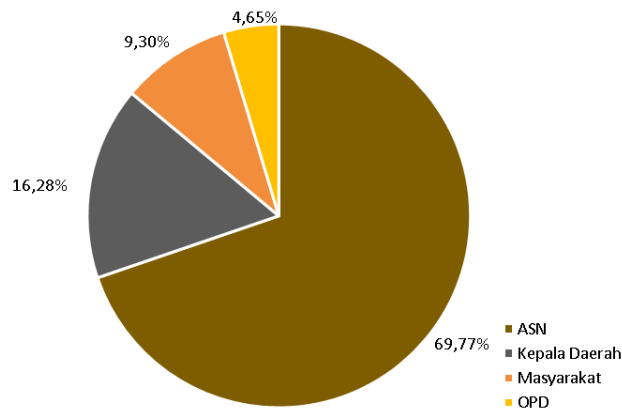
### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 104 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Mataram

Secara umum, jumlah inovasi terdapat peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kota Mataram yaitu inovasi digital yang diterapkan pada tahun 2019 sejumlah 7 inovasi kemudian mengalami peningkatan menjadi 8 inovasi yang diterapkan pada tahun 2020. Sedangkan untuk jenis inovasi non digital yang diterapkan pada tahun 2019 sejumlah 6 inovasi kemudian mengalami peningkatan menjadi 22 inovasi yang diterapkan pada tahun 2020.

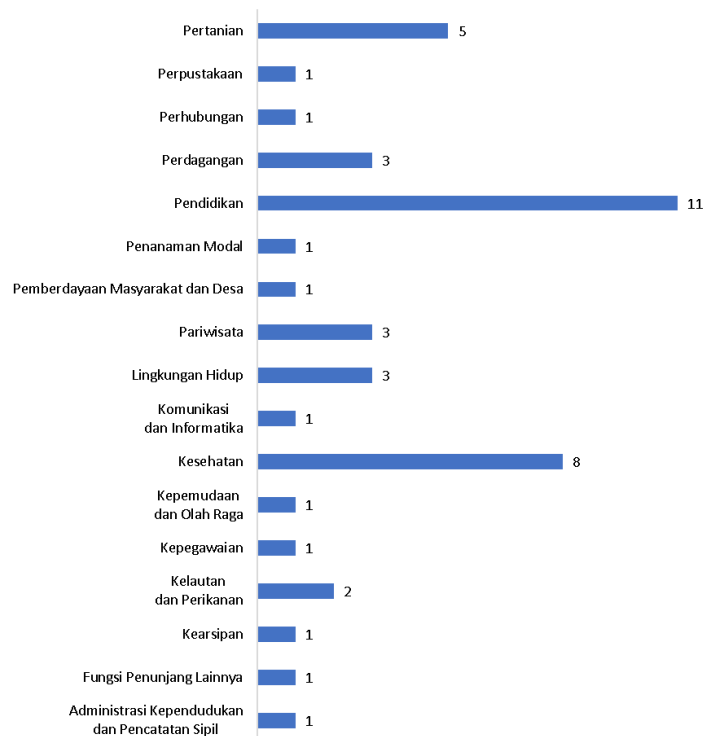
### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 105 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Mataram

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Mataram pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah yaitu sejumlah 2 (4.65%) inovasi, kemudian diinisiasi oleh Kepala Daerah sejumlah 7 (16.28%) inovasi, diinisiasi oleh Masyarakat sejumlah 4 (9.30%) inovasi dan diinisiasi oleh ASN sejumlah 30 (69.77%) inovasi. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan pada tahun 2021.

### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



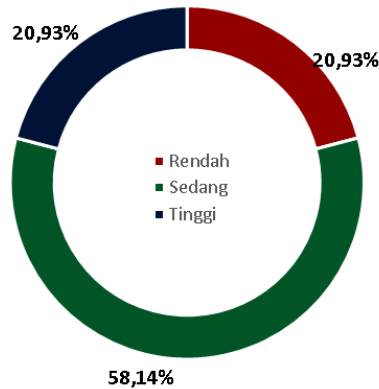
Gambar 106 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Mataram

Sebaran inovasi daerah pada Kota Mataram berdasarkan urusan pemerintahan sudah cukup merata karena mencakup 17 dari 32 urusan pemerintahan yang ada. Sebagian besar urusan



inovasi adalah inovasi pada urusan pendidikan yaitu sejumlah 11 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 2 (dua) dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 8 inovasi serta urusan pendidikan dengan 11 inovasi.

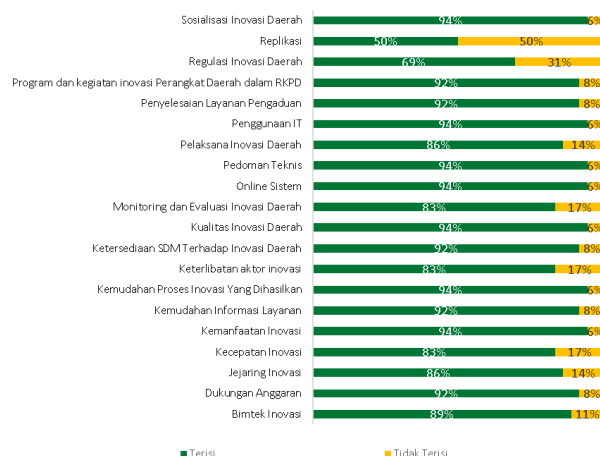
### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 107 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Mataram

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kota Mataram sejumlah 9 (20.93%) inovasi memiliki skor kematangan yang rendah, kemudian 25 (58.14%) inovasi memiliki skor kematangan sedang, serta 9 (20.93%) inovasi memiliki skor kematangan yang tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



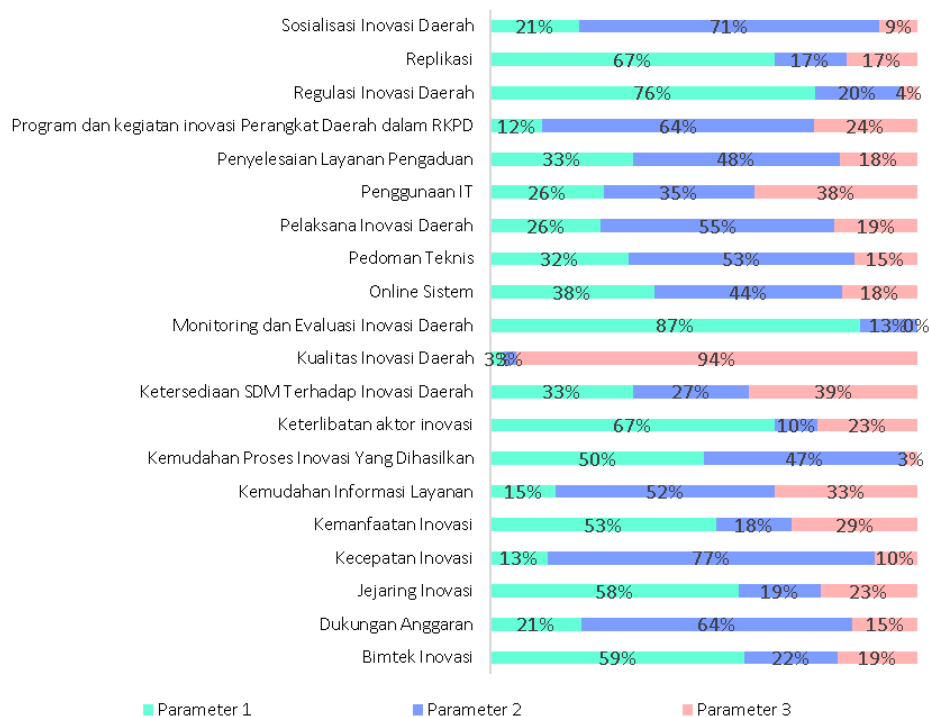
Gambar 108 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Mataram

Dari 43 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Mataram, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 12.50%

sedangkan 87.50% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator satuan inovasi daerah yang memiliki tingkat keterisian data pendukung yang paling besar adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Penggunaan IT, Pedoman Teknis, Online Sistem, Kualitas Inovasi Daerah, Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan dan Kemanfaatan Inovasi yaitu sebesar 94%. Hal tersebut berarti bahwa hampir semua inovasi yang dilaporkan oleh Kota Mataram telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu indikator Replikasi yaitu sebesar 50% yang artinya hanya terdapat 22 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Mataram yang terisi data pendukung dari indikator tersebut.

### i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 109 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kota Mataram

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa terdapat indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi yaitu indikator Kualitas Inovasi Daerah yaitu sebesar 94%. Artinya bahwa inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Kecepatan Inovasi yaitu sebesar 77%, artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah yaitu sebesar 87%, artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

## j. Daftar Inovasi Kota Mataram beserta Skor Kematangannya

Tabel 11 Daftar Inovasi Kota Mataram beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Modern/Mal (Lombok Epicentrum Mall)	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor PTSP (DPMPTSP Kota Mataram)	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Hotel (Hotel Maktal)	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Tradisional	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 pada sektor Pasar Tradisional (Pasar Dasan Agung)	12
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Hotel (Golden Palace Hotel Mataram Lombok)	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Tempat Wisata (Taman Sangkareang Mataram)	0
SIMUTIARA (SISTEM INFORMASI UNTUK KEPEGAWAIAN YANG TERINTEGRASI DI KOTA MATARAM)	85
E-RECALLSERI (E-RESERVASI, CALL CENTRE & SELF REGISTRATION) TERINTEGRASI	94
KAPSUL APIKA (ENKAPSULASI ARSIP PRIBADI/KELUARGA)	88
SEHATI (SENSUS HARIAN ELEKTRONIK)	77
SI KEDOK MERARIK (SISTEM KENDALI DOKUMEN REKAM MEDIS SECARA ELEKTRONIK)	83
SULE (SURVEI ELEKTRONIK)	71
PENGEMBANGAN MEDIA APIK	67
RANA PEDANGDUT (PELAYANAN PERPUSTAKAAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS/BERKEBUTUHAN KHUSUS)	79
BERMITRA DENGAN ORANG TUA SISWA MELALUI MEDIA DIGITAL THREE FOR ONE	65
BERKAH MELIMPAH GELISAH (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGOLAHAN SAMPAH)	118
TAK KU DUGA (ANTAR DOKUMEN WARGA)	105
ERUS PAKEL (PENGOLAHAN ISI RUMEN SAPI SEBAGAI PAKAN ALTERNATIF IKAN LELE)	83
SEMPRU (SISTEM PEMBERIAN PAKAN RASIONAL AUTOMATIS)	89
APLIKASI INGES (INFORMASI DALAM GENGAMAN MASYARAKAT)	100
BUDIDAYA ANGGREK BULAN DORITIS MEDIA TANAM SERABUT KELAPA DAN BATU BATA	61
KAMPUNG SORGHUM	102
PEMBELAJARAN MENULIS PUISI MENGGUNAKAN KASIH (KARTU DIKSI HARAN)	122

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
PECAH BELAH UNTUK BERMAIN MUSIK ANSAMBEL MENGGUNAKAN APLIKASI SAC (PELABEL SAC)	100
STIKER PINTAR ATASI KOMPLIKASI MATERNAL DI ERA PANDEMI	86
RME (REKAM MEDIS ELEKTRONIK)	85
MELE TANAM (MENYULAP LIMBAH CAIR TAHU MENJADI NUTRISI TANAMAN)	97
KAMPUNG SAHABAT (KAMPUNG SEHAT BEBAS TBC)	91
ALTERNATIF PENGGANTI MEDIA TANAMAN DAN PUPUK HIDROPONIK DARI SAMPAH ORGANIK	56
PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR NON TUNAI BERBASIS QRIS	93
MOBA GAMES UNTUK LITERASI GERAK	99
ASIK SKL (APLIKASI CETAK SURAT KETERANGAN LULUS)	109
PCG (PAIRWORK CARD GAME) DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS	73
EMPAT AKSY (KELOLA SAMPAH TERPADU SKALA KELURAHAN BERBASIS MASYARAKAT)	87
INDUSTRIALISASI KEBUN PERMACULTURE SEBAGAI INOVASI MATARAM MENGHADAPI PANDEMI	72
ARKUR-13 (APLIKASI RAPOR KURIKULUM 2013)	109
PIJAR! MATARAM (PERLUASAN INFORMASI DAN JARINGAN LAPOR! MATARAM)	104
ISAP (INCENERATOR SAMPAH RAMAH ASAP)	68
LUMBUNG SASAK (MELUKIS UNTUK MEMBANGUN PENGALAMAN SENI DAN AKTIVITAS BERKARAKTER)	84
DOKAR (DIARI OLAHRAGA DAN KEGIATAN ANAK DI RUMAH)	0
SPRINT 23 (SPREADSHEET INPUT NILAI TERINTEGRASI 23)	0
PANGAN BALUNG DENGAN (PEMANFAATAN PEKARANGAN SEBAGAI LUMBUNG SEDEKAH PANGAN)	94



# ***BAB III***

---

## ***PEMBAHASAN REKOMENDASI***



Fokus pembahasan pada bagian ini akan dibatasi pada hal-hal yang menjadi kekurangan pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada variabel-variabel dan indikator satuan Inovasi daerah dan perumusan rekomendasi berdasarkan hal tersebut. Hal Ini dikarenakan variabel dan indikator tersebut merupakan indikator input dan proses pendorong inovasi, sementara variabel dan indikator pada satuan pemerintah daerah adalah indikator makro pemerintah daerah yang ditempatkan sebagai indikator output makro pada pemerintah daerah. Variabel dan indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 12 adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Variabel dan Indikator Pada satuan Inovasi Daerah IID Tahun 2021

<b>SATUAN INOVASI DAERAH</b>	
<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>
<b>Infrastruktur</b>	Regulasi Inovasi Daerah
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah
	Dukungan anggaran
	Penggunaan IT
	Bimtek inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
<b>Output Pengetahuan dan teknologi</b>	Keterlibatan aktor inovasi
	Pelaksana inovasi daerah
	Jejaring inovasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah
<b>Kecepatan Bisnis Proses</b>	Pedoman teknis
	Kemudahan informasi layanan
	Kecepatan penciptaan inovasi
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan
	Penyelesaian layanan pengaduan
<b>Kecanggihan produk</b>	Online sistem
	Replikasi
	Kecepatan penciptaan inovasi
<b>Hasil Kreatif</b>	Kemanfaatan inovasi
	Monitoring dan Eval uasi Inovasi Daerah
	Kualitas inovasi daerah

## **A. KABUPATEN BIMA**

Kabupaten Bima pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 9,68 dan masuk pada kategori kurang inovatif. Berdasarkan gambar 1 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Bima pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa hasil dari satuan Inovasi daerah menunjukkan semua variabel perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Sehingga diperlukan pembinaan untuk meningkatkan indeks inovasi daerah tersebut, yang dapat dilihat pada Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 13 Pembinaan Inovasi Daerah di Kabupaten Bima Berdasarkan Capaian Variabel  
Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

VARIABEL	INDIKATOR	HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah perda jika Perda, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Perkada, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
	Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan inovasi
	Dukungan Anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Bimtek Inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
Output Pengetahuan	Keterlibatan Aktor	melakukan kolaborasi antar pemangku



VARIABEL	INDIKATOR	HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN
dan Teknologi	Inovasi	kepentingan
	Pelaksana Inovasi Daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi Daerah	bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda, meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman Teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkan kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan Informasi Layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan Proses Inovasi yang dilakukan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctya sebagai bahan perbaikan layanan
<b>Kecanggihan Produk</b>	Online sistem	mendorong Inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan Penciptaan Inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan gambar 8 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Bima berada di urusan kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagai menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 9 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Bima menunjukkan bahwa mayoritas inovasi sudah menunjukkan nilai kematangan rendah. Gambar 10 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa seluruh bagian indikator tidak terisi, sehingga diperlukan pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam negeri.

## B. KABUPATEN DOMPU

Kabupaten Dompu pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 30,05 dan masuk pada kategori Inovatif. Melihat gambar 11 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Dompu pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah, terdapat variabel yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu kecanggihan produk karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021) sehingga diperlukan optimalisasi untuk indikator kecanggihan produk yang dapat dilihat pada tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 14 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Dompu Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

VARIABEL	INDIKATOR	HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN
<b>Kecanggihan produk</b>	Online sistem	mendorong Inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan gambar 18 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi terbanyak di Kabupaten Dompu berada di urusan kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagai menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan

wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah, untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 19 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Dompu menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh Gambar 21 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa hampir keseluruhan indikator tidak mempunyai bukti dukung. Sehingga diperlukan pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam negeri.C.

### C. KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kabupaten Lombok Barat pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 12.61 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat gambar 22 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Lombok Barat pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah, menunjukkan semua variable perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Sehingga diperlukan pembinaan untuk meningkatkan indeks inovasi daerah tersebut, yang dapat dilihat pada Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15 Pembinaan Inovasi Daerah di Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

VARIABEL	INDIKATOR	HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah perda jika Perda, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Perkada, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
	Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan inovasi

VARIABEL	INDIKATOR	HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN
	Dukungan Anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Bimtek Inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
Output Pengetahuan dan Teknologi	Keterlibatan Aktor Inovasi	melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan
	Pelaksana Inovasi Daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi Daerah	bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda, meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman Teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkan ke masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan Informasi Layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat

VARIABEL	INDIKATOR	HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN
	Kemudahan Proses Inovasi yang dilakukan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan
<b>Kecanggihan Produk</b>	Online sistem	mendorong Inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan Penciptaan Inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan gambar 29 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Lombok Barat berada di urusan Pariwisata. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagai menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 30 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Gambar 31 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa seluruh bagian indikator tidak terisi, sehingga diperlukan pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam negeri.

#### D. KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kabupaten Lombok Tengah pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 37,77 dan masuk pada kategori Inovatif. Berdasarkan gambar 33 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Lombok Tengah pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa hasil

dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi masih dapat dilakukan pada variable kecanggihan produk karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Kondisi demikian untuk dapat mengoptimalkan Inovasi daerah di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilihat pada Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

VARIABEL	INDIKATOR	HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN
<b>Kecanggihan produk</b>	Online sistem	mendorong Inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan gambar 40 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Lombok Tengah berada di urusan Pariwisata, perhubungan dan perdagangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagai menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 41 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa mayoritas inovasi memiliki nilai kematangan sedang. Gambar 43 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas indikator sudah terisi yang masih harus dioptimalkan dengan cara, mempelajari terkait pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam negeri.

## E. KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kabupaten Lombok Timur pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 35.28 dan masuk pada kategori Inovatif. Berdasarkan gambar 44 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Lombok Timur pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi masih dapat dilakukan pada variabel kecanggihan produk karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Kondisi demikian untuk dapat mengoptimalkan Inovasi daerah di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilihat pada Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

VARIABEL	INDIKATOR	HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN
<b>Kecanggihan produk</b>	Online sistem	mendorong Inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan gambar 51 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Lombok Tengah berada di urusan Pariwisata, perhubungan dan perdagangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 52 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa mayoritas inovasi memiliki nilai kematangan sedang. Gambar 53 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas indikator sudah terisi yang masih harus dioptimalkan dengan cara, mempelajari terkait pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam negeri.

## F. KABUPATEN LOMBOK UTARA

Kabupaten Lombok Utara pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 32,56 dan masuk pada kategori Inovatif. Berdasarkan gambar 55 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Lombok Utara pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa hasil dari satuan Inovasi daerah terdapat variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021), yang dapat dilihat pada Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Lombok Utara Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

VARIABEL	INDIKATOR	HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN
Output Pengetahuan dan Teknologi	Keterlibatan Aktor Inovasi	melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan
	Pelaksana Inovasi Daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong Inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman Teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan Informasi Layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan Proses Inovasi yang dilakukan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan

Berdasarkan gambar 62 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Lombok Utara berada di urusan Perhubungan, Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagai menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal



tersebut, maka diperlukan dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 63 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan bahwa mayoritas inovasi memiliki nilai kematangan sedang. Gambar 64 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas indikator belum terisi sehingga diperlukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait cara, mempelajari pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam negeri.

## G. KABUPATEN SUMBAWA

Kabupaten Sumbawa pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 42,96 dan masuk pada kategori Inovatif. Berdasarkan gambar 66 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sumbawa pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi masih dapat dilakukan pada variable kecanggihan produk karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021), yang dapat dilihat pada Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

VARIABEL	INDIKATOR	HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong Inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain

Berdasarkan gambar 73 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Sumbawa berada di urusan Pariwisata dan Perdagangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi

antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 74 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa mayoritas inovasi memiliki nilai kematangan rendah. Gambar 75 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas indikator belum terisi sehingga diperlukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait cara, mempelajari pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam negeri.

## H. KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kabupaten Sumbawa Barat pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 43,68 dan masuk pada kategori Inovatif. Berdasarkan gambar 77 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sumbawa Barat pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi masih dapat dilakukan pada variable kecepatan bisnis proses karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021), yang dapat dilihat pada Tabel 20 sebagai berikut:

Tabel 20 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

VARIABEL	INDIKATOR	HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman Teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan Informasi Layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan Proses Inovasi yang dilakukan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan

Berdasarkan gambar 84 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Sumbawa Barat berada di urusan Kesehatan. Sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagai menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 85 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan bahwa mayoritas inovasi memiliki nilai kematangan sedang. Gambar 86 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas indikator hamper sebagian sudah terisi sehingga untuk mengoptimalkan diperlukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait cara, mempelajari pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam negeri.

## I. KOTA BIMA

Kota Bima pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 48,37 dan masuk pada kategori Inovatif. Berdasarkan gambar 88 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Bima pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi masih dapat dilakukan pada variable kecanggihan produk karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021), yang dapat dilihat pada Tabel 21 sebagai berikut:

Tabel 21 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kota Bima Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong Inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain

Berdasarkan gambar 95 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kota Bima berada di urusan Kesehatan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagai menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan dorongan agar inovasi

dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 96 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kota Bima menunjukkan bahwa mayoritas inovasi memiliki nilai kematangan rendah. Gambar 97 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas indikator sudah terisi sehingga diperlukan pengoptimalan dengan cara sosialisasi dan bimbingan teknis terkait cara mempelajari pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam negeri.

## J. KOTA MATARAM

Kota Mataram pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 53,17 dan masuk pada kategori Inovatif. Berdasarkan gambar 99 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Mataram pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi masih dapat dilakukan pada variable kecanggihan produk karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021), yang dapat dilihat pada Tabel 22 sebagai berikut:

Tabel 22 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

VARIABEL	INDIKATOR	HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong Inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain

Berdasarkan gambar 106 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Sumbawa berada di urusan Pariwisata dan Perdagangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi

antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 107 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa mayoritas inovasi memiliki nilai kematangan rendah. Gambar 108 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas indikator belum terisi sehingga diperlukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait cara, mempelajari pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam negeri.